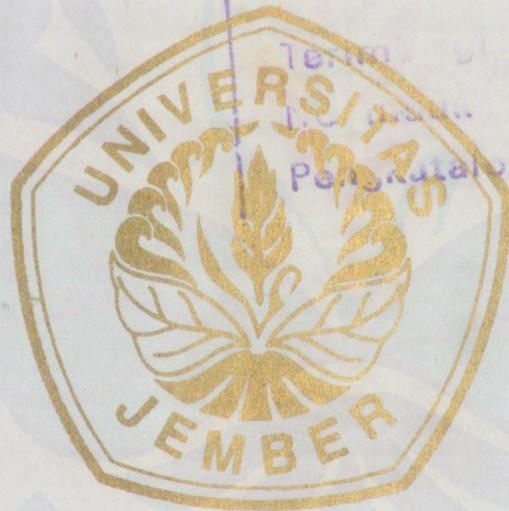


**ANALISIS DISPARITAS PEMBANGUNAN EKONOMI
ANTAR SATUAN WILAYAH PEMBANGUNAN (SWP)
JAWA TIMUR**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi
Universitas Jember



Asal :	Hadah	Klass
		338.9
		WAH
		a
Penyunting :		
Pembimbing :		
Pengantar :	<i>fu</i>	

Oleh :

Eni Wahyuningolk

000810101383

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER**

2004

JUDUL SKRIPSI

ANALISIS DISPARITAS PEMBANGUNAN EKONOMI
ANTAR SATUAN WILAYAH PEMBANGUNAN (SWP) JAWA TIMUR

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

N a m a : ENI WAHYUNINGSIH

N. I. M. : 000810101383

J u r u s a n : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

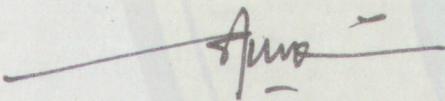
telah dipertahankan di depan Panitia Penguji pada tanggal :

29 MEI 2004

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar S a r j a n a dalam Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

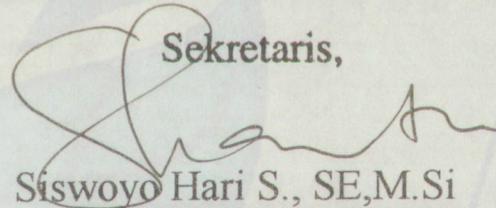
Ketua,



Drs. Badjuri, ME

NIP. 131 386 652

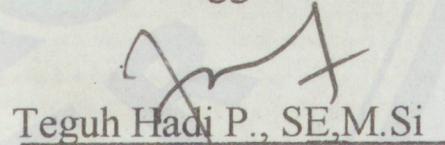
Sekretaris,



Siswoyo Hari S., SE, M.Si

NIP. 132 056 182

Anggota,



Teguh Hadi P., SE, M.Si

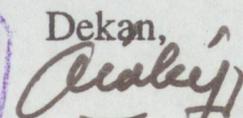
NIP. 132 192 300

Mengetahui/Menyetujui

Universitas Jember

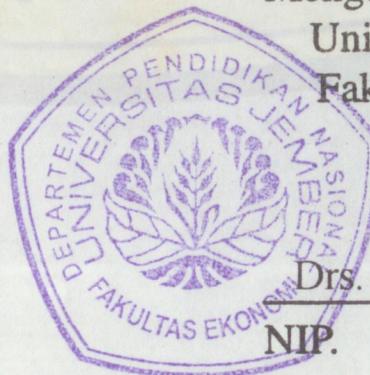
Fakultas Ekonomi

Dekan,



Drs. H. Liakip, SU

NIP. 130 531 976



TANDA PERSETUJUAN

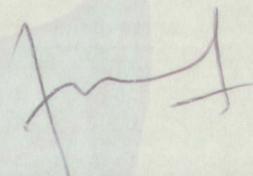
Judul Skripsi : Analisis Disparitas Pembangunan Ekonomi Antar Satuan
Wilayah Pembangunan (SWP) Jawa Timur
Nama : Eni Wahyuningsih
NIM : 000810101383
Jurusan : Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan
Konsentrasi : Ekonomi Regional

Pembimbing I



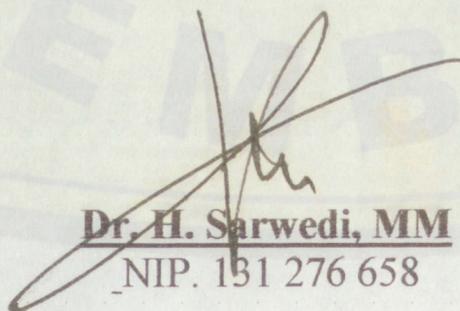
Drs. J. Sugiarto, SU
NIP. 130 610 494

Pembimbing II



Teguh Hadi P, SE, MSi
NIP. 132 192 300

Ketua Jurusan



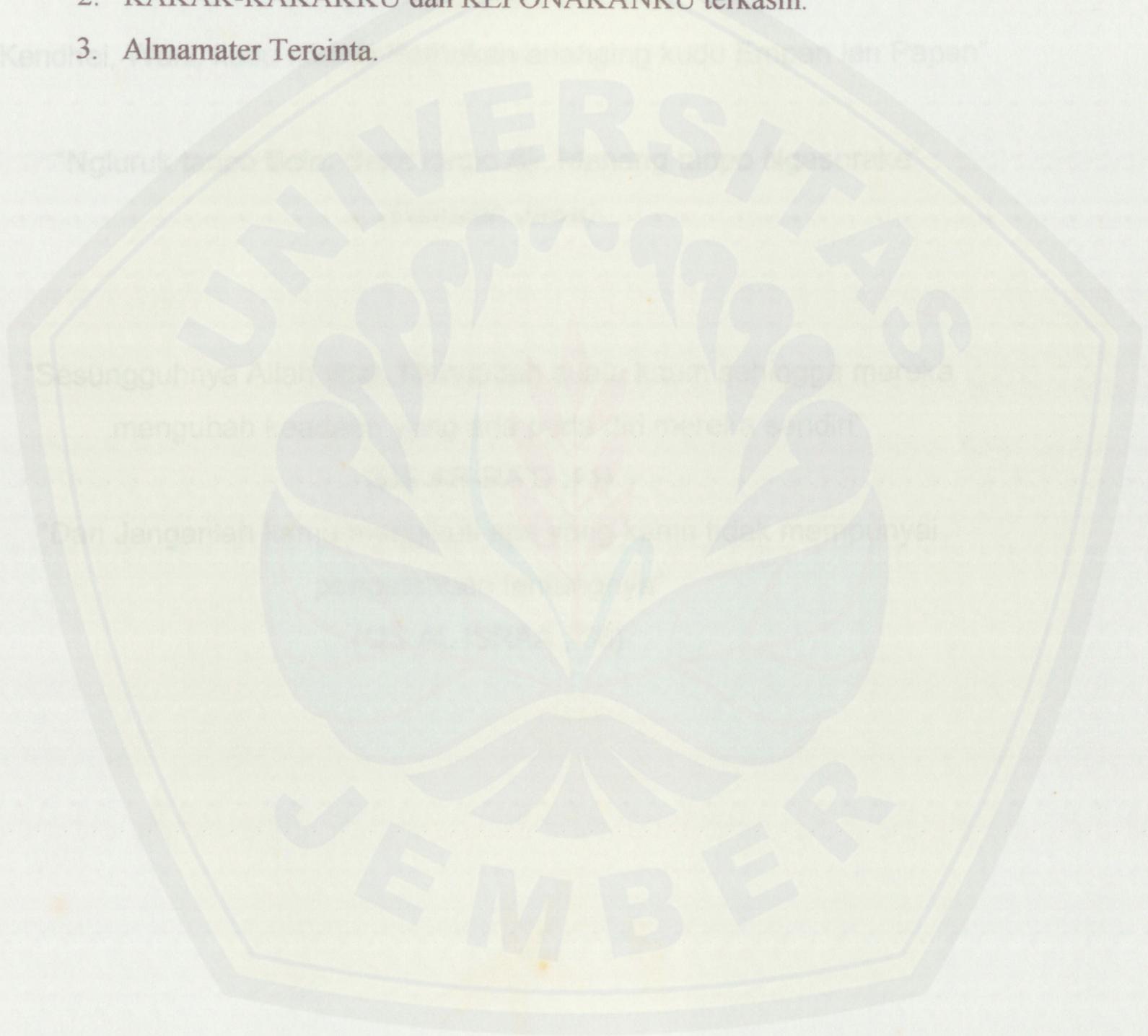
Dr. H. Sarwedi, MM
NIP. 131 276 658

Tanggal Persetujuan : 22 Mei 2004

PERSEMBAHAN

Karya Tulis ini kupersembahkan untuk :

1. BAPAK dan IBU tercinta, terimakasih atas semuanya, kasih sayang, doa, dukungan moril dan materiil yang tak pernah putus.
2. KAKAK-KAKAKKU dan KEPONAKANKU terkasih.
3. Almamater Tercinta.



Abstraksi

Dalam GBHN dijelaskan bahwa untuk menjamin keserasian dan keterpaduan Pembangunan Nasional perlu diusahakan keselarasan antara pembangunan sektoral dengan regional. Memang antara pendekatan sektoral dengan pembangunan regional tidak dapat dikatakan salah satu yang terbaik, namun jika dilihat dari dari potensi ekonomi dan karakteristik tiap-tiap daerah tidak sama, maka esensi dari dari pendekatan regional lebih kuat peranannya. Dalam kaitan dengan pembangunan antar daerah diindonesia terdapat beberapa masalah yang timbul antara lain adalah masalah kesenjangan(disparitas) pembangunan ekonomi antar daerah.

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan diatas , Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesenjangan pendapatan dan pola serta struktur perekonomian antar Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) Jawa Timur tahun 1997-2002.

Penelitian ini menggunakan data-data sekunder terutama data-data terbitan Biro Pusat Statistik (BPS) . Data yang digunakan adalah data secara time series dari tahun 1997-2002

Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode analisis yang penggunaannya disesuaikan dengan masalah yang diteliti, namun secara utuh metodeanalisis yang digunakan merupakan suatu kesatuan dalam menjawab masalah yang dikemukakan.

Metodologi penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah Indeks Williamson yaitu untuk mengukur kesenjangan pendapatan antar SWP jawa Timur, sedangkan untuk mengetahui pola serta struktur digunakan Tipologi Klassen.

Nilai indeks Williamson SWP Jawa Timur untuk tahun 1997-2002 berturut-turut adalah 0,497; 0,459; 0,436; 0,448; 0,450; 0,457. Sedangkan rata-rata Indeks Williamson antar kabupaten / kota dalam satu SWP tahun 1997 – 2002 berturut-turut dari SWP I sampai SWP IX adalah : 0,714 ; 0,109 ; 0,059 ; 0,136 ; 0,359 ; 0,421 ; 0,838 ; 0,373 ; 0,332. Pola dan struktur pertumbuhan ekonomi menunjukkan terdapat Satu SWP yang nerupakan daerah maju tapi tertekan, Empat SWP Daerah berkembang dan Tiga SWP merupakan daerah relatif tertinggal.

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa di Satuan Wilayah Pembangunan Jawa Timur terdapat kesenjangan pendapatan walaupun relatif kecil, sedangkan analisa kesenjangan antar kabupaten / kota dalam satu Satuan Wilayah Pembangunan Jawa timur menunjukkan kesenjangan tertinggi terdapat pada pada wilayah yang mengandalkan sektor sekunder (industri) dalam perekonomiannya, sebaliknya daerah yang mengandalkan pertanian sebagai sektor basis dalam perekonomiannya cenderung mempunyai kesenjangan yang kecil. Selanjutnya didasarkan pada penelitian ini perlunya pemerintah Daerah lebih memperhatikan perencanaan regional yang efektif dan mulai mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerahnya serta mengembangkan sektor basis sehingga dapat meningkatkan daya dukung daerah yang pada akhirnya dapat bersaing dengan wilayah lain.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur dipersembahkan kehadirat Alloh Swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini pula, menyampaikan dengan tulus rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Drs J Sugiarto selaku dosen pembimbing dan Bapak Teguh Hadi P, Msi selaku dosen wali dan dosen pembimbing, di dalam maupun di luar kampus, atas kesabarannya dalam memberikan arahan dan bimbingan yang bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Drs. Liakip, SU, Dekan Fakultas Ekonomi, seluruh staf pengajar dan karyawan di Fakultas Ekonomi, yang selama empat tahun telah berinteraksi dengan penulis, baik untuk kepentingan akademik maupun pergesekan intelektualnya.
3. Bapak Drs Sarwedi selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan.
4. BPS Cabang Jember, BPS Propinsi Jawa Timur dan Baperrop Jawa Timur yang dengan senang hati melayani penulis dalam mencari data.
5. Bapak dan Ibu tercinta, atas kesabaran dan keikhlasan dalam berdo'a, Kakak-kakakku, Mbak Rini, Mas Joko , Mas Edi , Mas Tikno serta keponakanku Dika, Miko dan Hida , terima kasih atas semua bantuan dan Spirit tulusnya.
6. Teman-teman Jurusan IESP angkatan 2000, terimakasih persahabatannya.
7. Ikhwan dan Akhwat di BASTILING, Terimakasih telah membuat penulis paham arti menjadi muslimah dan ingat Kebenaran Pasti akan Menang.
8. Kawan-kawan serta Adik-adik di LPME ECPOSE, Terimakasih kebersamaannya dalam berproses dan ingat perjuangan masih panjang.
9. Saudara-Saudaraku di Persaudaraan Setia Hati Terate komisariat UNEJ, yang telah mengajari arti mengenal diri sendiri dan Terimakasih persaudaraannya

10. Teman-teman KKT Kelompok 16 Desa Sumber Kemuning, Tamanan, Bondowoso, Semoga apa yang kita lakukan bermanfaat bagi masyarakat dan tidak sia-sia kita mengabdikan diri di desa.

11. Ibu Sungkono beserta keluarga dan Semua teman temanku di Bangka III no 6, Titin, Indah, Ita, Santi, Linda, Risa, Dwi, Dewi, Rina Terimakasih telah menemani penulis dalam suka maupun duka, buat Miss yuni Terimakasih rental Gratisnya.

12. serta semua pihak yang tidak mungkin penulis sebut satu persatu, terima kasih atas kalian semua.

Semoga segala bantuan dan kerjasamanya yang telah diberikan kepada Penulis, suatu saat nanti mendapatkan imbalan dari Alloh SWT.

Akhir kata, penulis berharap skripsi yang cukup sederhana ini bermanfaat bagi pembaca yang memerlukannya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Jember, Mei 2004

Penulis.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN ABSTRAKSI	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	10
1.2 Perumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	10
1.3.1 Tujuan penelitian	10
1.3.2 Manfaat penelitian	10
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu.....	11
2.2 Landasan Teori	12
2.2.1 Konsep Ekonomi Regional.....	12
2.2.2 Pembangunan Daerah.....	15
2.2.3 Strategi dan Ancangan Baru Pembangunan Nasional dan Daerah..	16
2.2.4 Kesenjangan Pendapatan	20
2.2.5 Analisis Tipologi Klassen.....	21
2.2.6 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	23
III. METODE PENELITIAN	25
3.1 Rancangan Penelitian.....	25
3.1.1 Jenis Penelitian.....	25
3.1.2 Unit Analisis.....	25

3.1.3 Daerah Penelitian.....	25
3.1.4 Populasi.....	25
3.2. Jenis dan Sumber Data.....	25
3.3 Metode Analisis Data.....	26
3.3.1 Indeks Williamson.....	26
3.3.2 Tipologi Klassen.....	27
3.4 Definisi Variabel Operasional.....	27
IV. ANALISA DAN PEMBAHASAN	29
4.1 Gambaran Umum Obyek yang diteliti.....	29
4.1.1 Keadaan Geografis	29
4.1.2 Aspek Fisik Wilayah.....	29
4.1.3 Keadaan Penduduk.....	30
4.1.3.1 Penduduk.....	30
4.1.3.2 Tenaga Kerja.....	31
4.1.4 Struktur Ekonomi Jawa Timur.....	32
4.1.5 PDRB Perkapita.....	36
4.2. Analisis Data	37
4.2.1 Analisis Indeks Williamson.....	37
4.2.2 Analisis Tipologi Klassen.....	39
4.3 Pembahasan.....	40
V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	45
5.1 Kesimpulan.....	45
5.2 Saran	45
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

TABEL	JUDUL	HALAMAN
1.1	PDRB daerah-daerah Tingkat I di Pulau Jawa berdasarkan harga Konstan 1999-2002 (Dalam jutaan Rupiah)	7
1.2	Distribusi Persentase PDRB menurut SWP dan kabupaten/Kota Propinsi Jawa Timur tahun 1997 dan 2002 atas harga berlaku (Persen)	9
2.1	Matrik klasifikasi Pertumbuhan Ekonomi menurut Tipologi Klassen	21
3.1	Matrik klasifikasi Pertumbuhan Ekonomi menurut Tipologi Klassen	26
4.1	Pertumbuhan Penduduk Pertengahan tahun per SWP Jawa Timur 1997-2002	29
4.2	Jumlah Pencari Kerja dan permintaan tahun 1997 dan 2002	30
4.3	Peranan Sektor Ekonomi dalam PDRB Jawa Timur Atas Harga Berlaku tahun 1999-2002	31
4.4	Banyaknya kabupaten/Kota di Jawa Timur menurut Peranan Sektor Pertanian tahun 2002	32
4.5	Banyaknya Kabupaten/Kota di Jawa Timur menurut Peranan Sektor Industri tahun 2002	33
4.6	Hasil Perhitungan Indeks Williamson antar Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) Jawa Timur 1997-2002	36
4.7	Hasil Analisis Perhitungan Indeks Williamson rata-rata tahun 1997-2002 antar Kabupaten/Kota dalam Satu satuan Wilayah pembangunan Jawa Timur	37
4.8	Matrik Klasifikasi Hasil Analisis Tipologi Klassen antar SWP Propinsi Jawa Timur 1997-2002	39

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun per Satuan Wilayah Pembangunan Jawa Timur 1997-2002
- Lampiran 2 : PDRB per Satuan Wilayah Pembangunan Jawa Timur tahun 1997-2002
- Lampiran 3 : PDRB Perkapita per Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) Jawa Timur tahun 1997-2002
- Lampiran 4 : Analisis laju Pertumbuhan Ekonomi Rata-rata Satuan Wilayah Pembanguna Jawa Timur
- Lampiran 5 : Hasil perhitungan Indeks Williamson antar satuan Wilayah Pembangunan (SWP) Jawa Timur Tahun 1997
- Lampiran 6 : Hasil perhitungan Indeks Williamson antar satuan Wilayah Pembangunan (SWP) Jawa Timur Tahun 1998
- Lampiran 7 : Hasil perhitungan Indeks Williamson antar satuan Wilayah Pembangunan (SWP) Jawa Timur Tahun 1999
- Lampiran 8 : Hasil perhitungan Indeks Williamson antar satuan Wilayah Pembangunan (SWP) Jawa Timur Tahun 2000
- Lampiran 9 : Hasil perhitungan Indeks Williamson antar satuan Wilayah Pembangunan (SWP) Jawa Timur Tahun 2001
- Lampiran 10 : Hasil perhitungan Indeks Williamson antar satuan Wilayah Pembangunan (SWP) Jawa Timur Tahun 2002
- Lampiran 11 : Hasil perhitungan Indeks Williamson antar Kabupaten/Kota dalam Satu SWP Jawa Timur tahun 1997
- Lampiran 12 : Hasil perhitungan Indeks Williamson antar Kabupaten/Kota dalam Satu SWP Jawa Timur tahun 1998
- Lampiran 13 : Hasil perhitungan Indeks Williamson antar Kabupaten/Kota dalam Satu SWP Jawa Timur tahun 1999
- Lampiran 14 : Hasil perhitungan Indeks Williamson antar Kabupaten/Kota dalam Satu SWP Jawa Timur tahun 2000

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.

Pembangunan nasional merupakan upaya-upaya peningkatan semua segi kehidupan bangsa, yang pada hakekatnya merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Ini berarti bahwa pembangunan nasional harus dilaksanakan merata di seluruh wilayah tanah air dan tidak hanya untuk untuk kesejahteraan suatu golongan atau sebagian dari masyarakat saja tetapi harus mensejahterakan seluruh masyarakat. Yang artinya hasil pembangunan harus benar-benar dapat dirasakan seluruh rakyat yang berwujud perbaikan mutu hidup yang berkeadilan sosial, sesuai tujuan dan cita-cita kemerdekaan bangsa.

Pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia agar bisa berjalan dengan serasi maka perlu adanya penyesuaian antara pembangunan sektoral dan pembangunan regional, seperti yang tercantum dalam GBHN bahwa setiap kegiatan pembangunan disamping pertimbangan-pertimbangan sektoral harus pula diperhatikan pertimbangan regional, pembangunan daerah merupakan bagian integral pembangunan nasional semakin mendorong dan meningkatkan stabilitas pemerataan pertumbuhan, pengembangan daerah serta peran serta dan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan di Indonesia telah diarahkan dan bertumpu pada konsepsi yang saling mengimbangi, yaitu Trilogi pembangunan. Salah satu unsur Trilogi Pembangunan adalah pemerataan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Pemerataan pembangunan diusahakan dengan kebijaksanaan pemerintah

suatu pendekatan yang menjamin tercapainya pembangunan yang serasi dan selaras antar sektor.

Salah satu teori ekonomi regional yaitu teori pusat pengembangan wilayah (*Growth Poles Theory*). Teori pusat pengembangan wilayah ini mempunyai keistimewaan ini dibanding dengan teori lainnya yaitu menggabungkan prinsip dekosentrasi dan desentralisasi. Perroux menyatakan bahwa perkembangan tidak muncul disemua tempat dan pada waktu yang bersamaan, timbulnya di beberapa tempat (*points*) atau beberapa *growth poles* dengan intensitas yang berlainan dan kemudian menyebar melalui berbagai macam saluran dengan efek yang bersamaan pula. Daerah yang menjadi pusat pengembangan akan tumbuh lebih cepat, sedangkan daerah lainnya akan tertinggal disegala bidang (Nursyaman, 1996).

Strategi pembangunan daerah yang diterapkan di Indonesia didasarkan pada konsep regionalisasi wilayah menurut Tjokro Winoto (Rudi Wibowo dan Sutrisno, 2002) yaitu pengelompokan wilayah secara fungsional kedalam wilayah-wilayah pembangunan besar dan kecil, berdasarkan keadaan geografi, topografi dan cuaca serta tingkat kesuburan tanah. Hal ini sejalan dengan pengelompokan propinsi-propinsi kedalam wilayah pembangunan, maka dalam lingkungan masing-masing propinsi dapat pula beberapa kabupaten / kotamadya berkelompok sebagai sub provinsional region yang berbentuk Satuan Wilayah Pembangunan (SWP). Tujuannya meningkatkan kerjasama pembangunan antara kabupaten-kabupaten yang bertetangga untuk mencapai hal-hal seperti pada perwilayahan pembangunan secara nasional.

Pengaturan tentang Penataan/pengaturan Ruang dalam lingkup nasional terdapat dalam Undang-Undang No.24 tahun 1992. Sedangkan Untuk Penataan ruang bagi wilayah propinsi dan kabupaten / kodya menurut undang –undang tersebut diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing daerah. Dalam pasal 10 ayat (1) UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, yang memberikan hak dan kewenangan mengelola sumberdaya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

8. SWP VIII (Madiun dan Sekitarnya) mencakup wilayah Kab/Kod. Madiun, Kab. Ponorogo, Kab. Magetan, Kab Pacitan, Kab. Ngawi dengan pusat madiun;
9. SWP IX (Tuban-Bojonegoro) mencakup wilayah Kab. Tuban, Kab. Bojonegoro dengan pusat di Tuban.

Pada tahun 1993 terbit sebuah laporan penelitian satu tim pakar dari Australia yang menguraikan kisah sukses (Success Story) pembangunan ekonomi Jawa Timur pada periode Orde Baru terutama tahun 1970-an dan 1980-an. Pertumbuhan tinggi selama dua dasawarsa yang dicapai melalui “revolusi hijau” (Green Revolution) dan industrialisasi tersebut memiliki keunikan dibandingkan sukses sejumlah propinsi lain. Dalam buku tersebut, pembangunan Jawa Timur disebut sebagai satu tipe ideal (ideal type) dari “Pembangunan yang berimbang” (Balanced Development) (Howard Dick, James J. Fox, Jamie Mackie, 1993 ; 23)

Jawa Timur dengan ibukota Surabaya dalam kurun waktu 1975-1983 mampu mempertahankan pertumbuhan rata-rata 8,1 persen, tetapi kemudian menurun menjadi 6 persen pada tahun-tahun “sulit” pertengahan 1980-an. Namun meningkat lagi menjadi 8 persen pada tahun 1988/1999. Pertumbuhan ini melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Yang membedakan Jawa Timur dengan propinsi-propinsi lain adalah bahwa pertumbuhan tinggi berupa meningkatnya pendapatan perkapita bukan karena kekayaan sumber daya alam yang melimpah, seperti minyak bumi dan gas atau hasi-hasil hutan. Jawa Timur mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produksi sektor pertanian tanaman pangan (terutama padi-padian dan jagung), tanaman perkebunan, sektor industri pengolahan dan sektor jasa (Howard Dick, James J. Fox, Jamie Mackie, 1993 ; 24).

Setelah lebih dari satu dasawarsa sejak laporan penelitian tersebut, banyak terjadi perubahan. Kebijakan deregulasi tahun 1988, juga membawa pengaruh besar bagi perekonomian jawa timur. Disamping itu, krisis moneter pada pertengahan 1997 juga berpengaruh terhadap perekonomian wilayah Jawa Timur. Pada tahun 1997, ekonomi Jawa Timur masih memiliki pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02 persen, selanjutnya tahun 1998 terpuruk dengan pertumbuhan negatif sebesar 16,12 persen. Pertumbuhan negatif ini sudah

diprediksi sebelumnya berkaitan dengan krisis ekonomi yang terus berlanjut. Tingkat kontraksi ekonomi Jawa Timur pada tahun 1998. Utamanya disebabkan disebabkan oleh kontraksi sektor industri pengolahan. Keadaan ini juga terkait dengan situasi melonjaknya nilai tukar dollar amerika terhadap rupiah, karena sebagian input antara industri pengolahan masih diimpor dari luar negeri. Menguatnya dollar secara luar biasa telah menyebabkan berkurangnya volume produksi di dalam negeri, ditambah lagi bahwa pasar produksi sebagian besar masih didalam negeri. .

Aktivitas pembangunan, khususnya bidang ekonomi, pada umumnya, seperti tahun tahun sebelumnya akan mengakibatkan pergeseran struktur ekonomi dari sektor priner kearah sektor sekunder dan tersier. Pengertian ini bukan berarti bahwa produksi sektor primer secara kuantitas absolut turun, namun diartikan tingkat kenaikan produksi sektor primer "kalah" cepat dibandingkan dengan tingkat kenaikan pada sektor hilirnya .Pergeseran struktur ekonomi yang terjadi di Jawa Timur sampai tahun 2000 sedikit "menyimpang " dari yang diduga sebelumnya. Diawali dari krisis sejak tahun 1997 yang mengakibatkan produktivitas sektoral sangat rendah , terutama sektor sekunder dan tersier yang selama ini dikenal punya laju produktivitas relatif tinggi, malah terjadi sebaliknya, mengalami kontraksi yang terus berlanjut. Akibatnya bisa diperkirakan bahwa pergerakan perekonomian Jawa Timur dari daerah agraris menuju daerah industri menjadi sedikit terkendala.

Pada tahun 1998 ketika sektor-sektor lain mengalami keterpurukan akibat adanya krisis ekonomi yang mencapai puncaknya pada tahun itu, Sektor pertanian justru memperlihatkan kinerja yang impresif. Namun demikian , seiring dengan membaiknya perekonomian, peran sektor pertanian dalam struktur ekonomi Jawa Timur cenderung mengalami penurunan dari tahun ketahun secara perlahan namun pasti. Peran sektor pertanian pada tahun 1998 kembali meningkat dari sebesar 16,75 persen pada tahun 1997 menjadi 21,24 persen. Dan peningkatan ini berlanjut sampai tahun 1999 , yaitu sebesar 21,77 persen. Perubahan ini bukan berarti sektor pertanian tumbuh hebat, tetapi semata-mata karena sektor produksi lain jatuh sangat parah.selanjutnya sejak tahun 2000 peranan tersebut berangsur-

angsur menurun kembali dan pada tahun 2002 tinggal sebesar 20,87 persen. tentunya kontribusi terbesar terletak pada subsektor tanaman bahan makanan.

Tabel 1.1 PDRB daerah-daerah Tingkat I di Pulau Jawa berdasarkan harga Konstan 1993 tahun 1999-2002 (Dalam Jutaan Rupiah)

No	Propinsi	Produk Domestik Regional Bruto (Dalam Jutaan Rupiah)			
		1999	2000	2001	2002
1	DKI Jakarta	57.215.224	59.694.419	61.865.971	64.259.075
2	Jawa Barat	53.442.335	55.660.205	57.824.843	60.096.782
3	Banten	-	16.540.147	17.340.654	18.216.573
4	Jawa Tengah	39.394.514	40.941.667	42.305.176	43.759.541
5	DI Yogyakarta	4.824.446	5.017.709	5.182.544	5.357.669
6	Jawa Timur	55.058.970	56.856.521	58.750.180	60.754.056

Sumber : BPS propinsi Jawa Timur, Tahun 1993 dan 2002

Pada tahun 1999 perekonomian Jawa Timur sudah mulai bangkit dengan tumbuh sebesar 1,21 persen, lebih baik bila dibandingkan dengan pertumbuhan nasional dan DKI sebesar 0,79 persen dan 0,29 persen. Sedangkan Jawa Barat dan Jawa Tengah mengalami pertumbuhan sedikit lebih tinggi yaitu masing-masing sebesar 1,22 persen dan 3,49 persen. Jawa Timur saat ini juga mempunyai peran kedua dalam penyumbang PDB nasional setelah DKI Jakarta (tabel 1). PDRB pada tahun 1999, 2000, 2001, 2002 berturut-turut sebesar 55.058.970 juta, 56.856.521 juta, 58.750.180 juta dan 60.754.056 juta, yang diikuti oleh Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Dilihat dari kontribusi PDRB atas dasar harga berlaku (tabel 2) pada tahun 1997 dan 2002 terjadi pergeseran struktur ekonomi antar SWP yang cukup signifikan. Sumbangan ekonomi SWP I terhadap ekonomi Jawa Timur tahun 1997 sebesar 43,16 persen pada tahun 2002 turun menjadi 40,28 persen. Wilayah SWP I (Sidoarjo, Mojokerto, Lamongan, Gresik, Bangkalan, Kota Mojokerto dan Surabaya) pada kenyataannya adalah daerah yang padat industri, oleh karena itu sumbangan sektor ini adalah paling besar. Akibat krisis ekonomi dan moneter penciptaan nilai tambah industri di wilayah tersebut mengalami kontraksi yang sangat signifikan pula. Akhirnya perekonomian secara keseluruhan di wilayah

tersebut juga mengalami kontraksi yang berarti. kontraksi di wilayah tersebut paling hebat dibanding wilayah lain di Jawa Timur, akibatnya kontribusi di wilayah tersebut menurun .

Selain SWP I yang mengalami penurunan, 7 SWP lainnya di Jawa Timur mengalami kenaikan kontribusi, di 7 SWP tersebut sektor primer (pertanian) masih mendominasi dalam penciptaan PDRB. Ini menunjukkan bahwa Jawa Timur masih merupakan wilayah agraris, sehingga perekonomiannya sebagian besar masih ditopang oleh sektor pertanian . karena kontraksi sektor primer tidak sehebat kontraksi sektor sekunder (industri) maka yang terjadi adalah kontribusi sektor sekunder menurun dan kontribusi sektor primer naik. Gambaran ini mempertegas bahwa sektor ekonomi primer di Jawa Timur cukup tahan terhadap terpaan krisis yang menghebat pada tahun 1998.

Namun seiring dengan perkembangan tersebut terdapat juga tantangan yang harus dihadapi diantaranya disparitas/kesenjangan pendapatan yang tidak merata Kalau dilihat peranan Surabaya sebagai pusat pertumbuhan SWP I belum mempunyai pengaruh yang kuat terhadap SWP-SWP lain, jika kita bandingkan dengan pengaruh kompleksitas dari industri Jabotabek terhadap Jawa Barat. Dilihat dari kontribusi PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 1997 dan 2002 pada tabel dapat dilihat peringkat tertinggi ditempati oleh SWP I dengan kota Surabaya sebagai pusat pertumbuhan sekaligus penyumbang kontribusi PDRB terbesar pada SWP I .Hal ini menunjukkan bahwa SWP I mempunyai potensi yang sangat besar dalam penciptaan nilai tambah di Jawa Timur yang posisinya sulit tergeser oleh SWP lainnya.

Perbedaan kontribusi PDRB berdasarkan harga berlaku yang tampak pada Tabel 2 merupakan perwujudan ketimpangan atau disparitas (regional) yang terdapat pada propinsi Jawa Timur. Ini menggambarkan terdapat ketidakmerataan hasil dari proses pembangunan yang selama ini dilaksanakan.

Tabel 1.2. Distribusi persentase PDRB menurut SWP dan Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Timur Tahun 1997 dan 2002 atas dasar harga berlaku.

SWP/Kabupaten/Kota	Tahun 1997 Kontribusi	Tahun 2002 Kontribusi
Satuan Wilayah Pembangunan I	42,64	40,27
15 Kab. Sidoarjo	8,68	8,35
16 Kab. Mojokerto	1,91	1,99
24 Kab. Lamongan	1,53	1,69
25 Kab. Gresik	5,76	5,69
26 Kab. Bangkalan	1,09	1,14
76 Kota Mojokerto	0,50	0,52
78 Kota Surabaya	23,18	20,90
Satuan Wilayah Pembangunan II	3,49	3,58
27 Kab. Sampang	1,05	1,18
28 Kab. Pamekasan	0,85	0,87
29 Kab. Sumenep	1,59	1,53
Satuan wilayah Pembangunan III	3,00	3,08
10 Kab. Banyuwangi	3,00	3,08
Satuan Wilayah pembangunan IV	5,30	5,79
9 Kab. Jember	3,12	3,39
11 Kab. Bondowoso	0,98	1,09
12 Kab. Situbondo	1,20	1,31
Satuan Wilayah pembangunan V	4,70	4,79
8 Kab. Lumajang	1,62	1,71
13 Kab. Probolinggo	2,11	2,20
74 Kota Probolinggo	0,96	0,88
Satuan Wilayah Pembangunan VI	12,89	13,15
7 Kab. Malang	3,96	3,99
14 Kab Pasuruan	4,32	4,65
33 Kota malang	4,07	3,66
35 Kota Pasuruan	0,57	0,56
39 Kota Batu	-	0,29
Satuan wilayah Pembangunan VII	18,25	19,16
3 Kab Trenggalek	0,65	0,71
4 Kab Tulungagung	2,06	2,18
5 Kab Blitar	1,29	1,46
6 Kab Kediri	2,37	2,56
17 Kab. Jombang	1,68	1,78
18 Kab. Nganjuk	1,34	1,35
31 Kota Kediri	8,43	8,70
32 Kota Blitar	0,44	0,42
Satuan Wilayah Pembangunan VIII	5,41	5,81
1 Kab. Pacitan	0,63	0,68
2 Kab. Ponorogo	1,04	1,19
19 Kab. madiun	0,90	0,94
20 Kab. Magetan	1,00	1,12
21 Kab Ngawi	1,11	1,19
77 Kota Madiun	0,73	0,69
Satuan Wilayah Pembangunan IX	4,32	4,37
22 kab. Bojonegoro	1,50	1,55
23 Kab. Tuban	2,82	2,82
Propinsi jawa Timur	100,00	100,00

Sumber : BPS Propinsi Jawa Timur, 2002

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Drs. Badjuri, yaitu melakukan analisis ketimpangan/kesenjangan antar kabupaten di Jawa Timur dengan menggunakan koefisien disparitas Williamson dari PDRB perkapita. Indeks Williamson untuk Jawa Timur tidak begitu baik karena sudah melebihi nasional (0,4), sedangkan untuk Jawa Timur berkisar antara 0,6. Di luar propinsi yang memiliki PDRB / capita terbesar (Kodya Kediri dan Kodya Surabaya) secara umum ketimpangan antar daerah menurun drastis dibandingkan jika kedua daerah tidak dimasukkan dalam perhitungan, hasilnya Indeks Williamson sejak tahun 1980-1987 masing-masing : 0,37; 0,36; 0,37; 0,32; 0,31; 0,31; 0,36. Dari angka –angka tersebut dapat dilihat bahwa ternyata dengan mengeluarkan Kodya Surabaya dan Kodya Kediri ternyata kesenjangan di Jawa Timur dapat dikurangi dan menunjukkan keadaan yang sangat baik. Dengan demikian dapat diketahui bahwa pertumbuhan yang pesat dari kedua daerah tersebut mengakibatkan adanya kesenjangan Jawa Timur yang sangat lebar.

Imam Budi Hartono dalam penelitian berjudul “ Kesenjangan Pendapatan Antar Daerah di Jawa Timur Tahun 1990-1993” menyebutkan bahwa indeks williamson propinsi Jawa Timur untuk tahun 1990-1993 berturut-turut 1,33; 1,36; 1,39; 1,43, sedangkan nilai indeks Williamson nasional yang dilakukan BPS berkisar antara 0,6-0,7. Hal ini membuktikan bahwa kesenjangan pendapatan antar daerah sangat besar dipropinsi Jawa Timur . Jika daerah-daerah yang mempunyai sektor sektor industri dan daerah yang PDRB-nya tinggi dikeluarkan dari perhitungan ternyata nilai indeks Williamson Jawa Timur turun drastis menjadi 0,49; 0,49; 0,50; 0,52 dibawah nilai indeks williamson nasional. Hal tersebut menunjukkan keseimbangan pendapatan antar daerah di Jawa Timur dan sekaligus membuktikan bahwa dengan timbulnya daerah-daerah industri mengakibatkan banyak daerah tidak dapat mengimbangi pertumbuhannya.

Pertumbuhan yang pesat beberapa daerah di Jawa timur khususnya sektor industri mengakibatkan kesenjangan yang lebar di Jawa Timur.

Sunoto dan Daryono Soebagio pada tahun 1999 melakukan penelitian untuk menganalisis ketimpangan pendapatan antar datu II yang dijabarkan dalam tiga hal yaitu tingkat pertumbuhan PDRB, distribusi pendapatan, pergeseran struktur ekonomi. Untuk menghitung ketimpangan pembangunan antar Datu II digunakan rumus Indeks Williamson, Guna menganalisis sektor unggulan pada masing-masing datu II digunakan pendekatan Location Quotient (LQ). Hasil dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa tingkat pendapatan perkapita antar provinsi tidak sama demikian juga dengan pendapatan perkapita antar datu II. Provinsi dengan tingkat pendapatan perkapita relatif lebih tinggi dibandingkan dengan lainnya adalah DKI Jakarta dengan indeks VW sebesar (0,44), Kaltim (0,24), Riau (0,18), dan Jateng (0,17). Adapun Kabupaten yang mempunyai tingkat pendapatan perkapita lebih tinggi untuk masing-masing provinsi diatas adalah : jakarta pusat, Batam, Kutai, Kudus. Dengan ketimpangan tersebut menghasilkan koefisien VW secara keseluruhan pada tahun 1988 sebesar 0,73 menjadi 0,63 pada tahun 1996.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Konsep Ekonomi Regional

Ilmu ekonomi Regional atau ilmu ekonomi wilayah sebenarnya merupakan salah satu ilmu yang muda dan merupakan cabang-cabang dari ilmu ekonomi konvensional yang menitikberatkan pada dimensi "tata ruang" (*Space, Spatial*) dalam pengertian ekonomi. ilmu ini timbul untuk memecahkan masalah yang berhubungan dengan masalah pertanyaan "dimana" yang pada umumnya sering diabaikan pada analisa ekonomi.

Tumbuh dan berkembangnya ilmu ekonomi regional sebagai suatu disiplin akademis pada dasarnya telah dipercepat oleh implikasi-implikasinya dibidang kebijaksanaan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi selama beberapa tahun terakhir ini telah semakin memperjelas bahwa kekuatan-kekuatan pasartidaklah pasti mengakibatkan kesamaan pendapatan regional. Kesenjangan Regional sangat mungkin terjadi akibat berbagai kondisi. Perpindahan sumberdaya atau faktor-

faktor dapat mengakibatkan ketidakseimbangan, dan wilayah-wilayah yang kurang berkembang dapat menderita kerugian (*distorsi*) karena keluarnya sumberdaya modal dan imigrasi penduduk keluar wilayah. Dampak ganda (*Multiplier Effect*) dari pembangunan sesuatu wilayah dapat saja dinikmati wilayah yang bersangkutan, akan tetapi dapat juga berlaku sebaliknya, tergantung aspek-aspek regional yang ada.

Ruang lingkup ilmu ekonomi regional atau ekonomi wilayah seperti yang diuraikan Rudi Wibowo dan Soetrisno (1995:9) pada dasarnya menitikberatkan pada persoalan-persoalan (a) peran dan kepentingan wilayah terhadap perekonomian secara menyeluruh, untuk tercapainya perkembangan ekonomi yang optimal, (b) peran dan kepentingan wilayah terhadap masalah-masalah distribusi pembangunan didalam dan antar wilayah, (c) peran peubah-peubah lokasional dan tata ruang (*spatial*) didalam pembangunan (wilayah) secara optimal, sehingga lekat kepada pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan dampak pengganda (*Multiplier*), dan (d) mempelajari aspek-aspek yang berkaitan dengan kebijaksanaan pembangunan (wilayah).

Definisi wilayah secara umum yang pernah dikemukakan adalah merupakan buah pikiran dari suatu daerah geografis yang disusun dalam suatu intisari, sehingga pernyataan tentang wilayah sebagai suatu keutuhan yang mempunyai arti dapat dibuat. Dengan demikian, wilayah (*region*) dapat merupakan suatu unit geografi yang membentuk suatu kesatuan. Adapun manfaat dari proses pengelompokan untuk demarkasi (pembatasan) suatu wilayah tertentu sangat diperlukan untuk tujuan administrasi dan formulasi, serta untuk melengkapi rencana-rencana dan kebijaksanaan negara (*public policy*).

Konsep pengembangan wilayah nasional Indonesia mempunyai tujuan-tujuan (Hadjisaroso, 1990:2) :

- 1) Mewujudkan keseimbangan antar daerah dalam hal tingkat pertumbuhan ;
- 2) Memperkokoh kesatuan ekonomi Nasional
- 3) Memelihara efisiensi pertumbuhan nasional

Proses berkembangnya wilayah menurut Hadjisaroso (1980:15) berlangsung dengan mengikuti mekanisme tertentu, yang disebut dengan

bersangkutan (Endogeneous development) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah).

Analisis tentang pembangunan ekonomi daerah lebih banyak mengungkapkan mengenai sifat-sifat ekonomi daerah terutama masalah potensi ekonomi dan proses pertumbuhan ekonomi daerah ditinjau dari sudut lokasinya. Hal tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa dalam suatu daerah yang terbagi dalam dalam sub wilayah umumnya terjadi ketidakseimbangan dalam kegiatan ekonominya. Berbagai daerah dan sub wilayah mempunyai keadaan yang berbeda-beda dilihat dari segi perkembangan pembangunan. Ada daerah yang relatif maju dan ada pula daerah yang tidak mengalami pertumbuhan. Suatu faktor dasar dlm perbedan ini adalah struktur perekonomian dan daerah yang bersangkutan (Glasson, 1977 ; 62). Sedangkan lewis (1994 ; 76) menjelaskan bahwa perbedaan tersebut disebabkan karena masing-masing daerah mempunyai potensi pertumbuhan yang berbeda, yang dapat terjadi karena keadaan geografis setempat. Selanjutnya Jhingan (1990 ; 85) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomio dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor ekonomi dan faktor non ekonomi. Perkembangan suatu daerah disebabkan oleh banyak faktor . faktor-faktor tersebut antara lain meliputi keunggulan komparatif, akses pasar, dukungan kelembagaan, prasarana sosial dan ekonomi serta kebijaksanaan ekonomi regional pada wilayah yang bersangkutan .

Sesuai dengan potensi pembangunan , bahwa tiap wilayah mempunyai keunggulan lokasi tersendiri yang timbul karena keadaan geografis setempat, sebagai konsekuensinya penentuan prioritas pembangunan aka berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. karenanya, dapat saja terjadi bahwa kebijaksanaan pembangunan pada suatu daerah berbeda dengan daerah lainnya.

2.2.3 Strategi dan Ancangan Baru Pembangunan Nasional dan Daerah

Bahwa pertumbuhan ekonomi yang diupayakan dari berbagai program yang dilaksanakan pada proses pembangunan yang telah berlangsung sebelumnya ternyata tidak dengan sendirinya dapat menyelesaikan permasalahan sosial ekonomi yang dihadapi. Asumsi *trickle down effect* yang melekat pada paradigma

pertumbuhan (*growth paradigm*) yang diharapkan secara otomatis menyertai pertumbuhan tidak muncul, dan asumsi bahwa setiap pelaku ekonomi mempunyai produktivitas dan akses terhadap faktor produksi yang sama tidak pernah terjadi sehingga menyebabkan berbagai kesenjangan di masyarakat makin melebar.

Sejalan dengan perputaran waktu, banyak orang makin menyadari bahwa pembangunan tidak hanya ingin meraih pertumbuhan semata, namun aspek pemerataan mulai mengedepan untuk mendapatkan perhatian yang lebih besar. Di samping itu kesadaran akan pentingnya peningkatan peran serta daerah dan masyarakat juga makin mewarnai diskursus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Munculnya pemikiran bahwa pertumbuhan harus beriringan dengan pembagian hasil-hasil pembangunan secara lebih merata, yang dikenal dengan *redistribution with growth* diyakini akan lebih menjamin keberlanjutan pembangunan itu sendiri. Sejalan dengan hal ini, peningkatan peran serta daerah dan masyarakat menyebabkan program-program pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan (*sustainable*) dan terhindar dari *policy fallacy* - sebagai akibat dari kesalahan pendeterminasian kebutuhan masyarakat.

Melalui Garis-garis Besar Haluan Negara 1993 yang merupakan tahun pertama PJP II, logi pemerataan dikedepankan dalam proses pembangunan nasional, dibandingkan dua logi lainnya yaitu pertumbuhan dan stabilitas. Pada era ini *political will* pemerintah, khususnya yang berada di lembaga-lembaga perencanaan pembangunan telah secara nyata terlihat untuk memperbaiki strategi pembangunan yang akan ditempuhnya.

Sebagai koreksi maka harus diadopsi strategi pembangunan baru yang memadukan pertumbuhan dan pemerataan, yang pada dasarnya mempunyai tiga arah yaitu 1) pemihakan dan pemberdayaan masyarakat, 2) pemberian otonomi dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan pembangunan di daerah, dan 3) modernisasi melalui penajaman dan pemantapan arah dari perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat (Sumodiningrat, 1996).

Pemberdayaan yang bermakna kekuatan dari dalam, namun dapat diperkuat dengan unsur-unsur penguatan yang diserap dari luar. Dengan

demikian maka pemberdayaan ditujukan untuk melepaskan belenggu kemiskinan dan keterbelakangan serta memperkuat posisi lapisan masyarakat dalam struktur kekuasaan (Kartasasmita, 1996c). Sebagai konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial, pemberdayaan masyarakat mencerminkan paradigma baru pembangunan, yaitu yang bersifat *people-centered*, *participatory*, *empowering*, dan *sustainable* seperti dikemukakan Robert Chamber.

Konsep pemberdayaan ini tidak mempertentangkan pertumbuhan dengan pemerataan sebagaimana dikatakan Donald Brown, namun mencoba untuk melepaskan diri dari perangkap *zero-sum game* dan *trade off*. Konsep ini bertitik tolak dari pandangan bahwa dengan pemerataan akan tercipta landasan yang lebih luas untuk pertumbuhan dan akan menjamin pertumbuhan yang berkelanjutan. Dengan demikian maka dalam proses pembangunan tidak hanya semata-mata laju pertumbuhan yang perlu dicermati, tetapi juga pola pertumbuhannya itu sendiri, yaitu pertumbuhan yang menurut istilah Gustav Ranis adalah pertumbuhan yang tepat (*the right kind of growth*) yakni bukan yang vertikal menghasilkan “tetesan ke bawah” – yang telah terbukti tidak berhasil, melainkan bersifat horisontal – berbasis luas dan menciptakan kesempatan kerja dan tidak terkotak-kotak.

Dalam kerangka ini, Kartasasmita (1996c) mengajukan tiga sisi upaya pemberdayaan masyarakat, yaitu (1) menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang (*enabling*), (2) memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*), dan (3) melindungi dengan jalan mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang sehingga yang lemah tidak menjadi bertambah lemah karena kekurangberdayaan menghadapi yang kuat.

Pada masyarakat yang masih tertinggal, pemihakan dan pemberdayaan masyarakat tidak cukup hanya dengan meningkatkan produktivitasnya, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan memberikan suntikan modal saja, melainkan harus dijamin adanya kerjasama yang erat di antara yang kuat dengan yang lemah secara berkesinambungan. Sementara untuk masyarakat yang sudah lebih maju, pemberdayaan diarahkan pada penciptaan iklim yang

Setwilda Kabupaten, maupun unsur pengendalian dan pengawasan oleh Inspektorat Wilayah.

Otonomi daerah dengan demikian harus ditempatkan dalam kerangka untuk memberi kewenangan kepada daerah untuk mengkoordinasikan dan memadukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan berbagai program pembangunannya sendiri.

Sejalan dengan hal tersebut, aparat pemerintah daerah sebagai pembina dan pendamping harus mampu menjamin terselenggaranya tugas pemerintahan dan pembangunan yang efisien dan efektif yang tanggap terhadap aspirasi rakyat dan mampu melayani, menghargai prakarsa dan peran serta aktif rakyat dalam pembangunan serta makin mencurahkan perhatiannya pada upaya-upaya pemerataan. Dengan demikian dalam menghadapi masalah-masalah keadilan sosial dan kepentingan rakyat banyak, pemerintah tidak boleh netral tetapi harus berpihak.

Dalam bidang fiskal dan moneter, khususnya pengalokasian anggaran pembangunan yang biasanya dijalankan dan dikendalikan oleh pemerintah pusat, harus dapat mendorong proses peningkatan efisiensi alokasi sumber daya ekonomi dengan mengarahkan aliran sumber daya tersebut untuk mengatasi kesenjangan, baik antardaerah, antarsektor, maupun antargolongan pendapatan. Dengan demikian maka peningkatan pangsa desentralisasi harus segera dilakukan menggantikan dekonsentrasi.

Untuk menjamin terciptanya pemerataan maka harus penentuan prioritas dan pengalokasian pembangunan harus memperhatikan keseimbangan antardaerah sehingga dapat mengurangi kesenjangan yang tercipta dalam proses pembangunan sebelumnya.

2.2.4 Kesenjangan Pendapatan

Pembangunan yang telah menghasilkan pertumbuhan yang cukup tinggi, ternyata belum sepenuhnya dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, dengan kata lain pertumbuhan yang tinggi belum mampu sepenuhnya mengatasi persoalan kesenjangan (disparitas) antar daerah. Ardani (1992:3)

pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan perkapita daerah. Dengan menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertikal dan rata-rata pendapatan perkapita sebagai sumbu horizontal, daerah yang diamati dapat dibagi menjadi empat klasifikasi, yaitu daerah cepat maju dan cepat tumbuh (*high growth and high income*), daerah maju tapi tertekan (*high income but low growth*), daerah berkebang cepat (*high growth but low income*), dan daerah relatif tertinggal (*low growth and low income*) (Syafrizal, 1997:27-38; Kuncoro, 1993; Hill, 1989).

Tabel 2.1. Matrik Klasifikasi Pertumbuhan Ekonomi menurut Tipologi kelas

PDRB per kapita(y)	$y_i < y$	$y_i > y$
Laju Pertumbuhan (r)		
$r_i > r$	Daerah berkembang cepat	Daerah cepat maju dan cepat tumbuh
$r_i < r$	Daerah relatif tertinggal	Daerah maju tapi tertekan

Sumber : Prisma (1997: 23)

Keterangan :

r_i = Laju pertumbuhan PDRB SWP i

r = Laju pertumbuhan total PDRB Jawa Timur

y_i = PDRB perkapita SWP i

y = PDRB perkapita Jawa Timur

Kriteria yang digunakan untuk membagi daerah Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- (1) Daerah cepat maju dan cepat tumbuh, daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang lebih tinggi dibanding rata-rata SWP di Jawa Timur.
- (2) Daerah maju tapi tertekan, daerah yang memiliki pendapatan perkapita lebih tinggi, tetapi tingkat pertumbuhannya lebih rendah dibanding rata-rata SWP di Jawa Timur.

- (3) Daerah berkembang cepat, adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi, tetapi tingkat pendapatan perkapita lebih rendah dibanding rata-rata SWP di Jawa Timur.
- (4) Daerah relatif tertinggal adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang lebih rendah dibanding rata-rata SWP di Jawa Timur. Disebut “tinggi” apabila indikator disuatu SWP lebih tinggi dibandingkan rata-rata keseluruhan SWP di Jawa Timur; Digolongkan “rendah” apabila indikator disuatu SWP lebih rendah dibandingkan rata-rata seluruh SWP di Jawa Timur.

2.2.4 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Sebagai tolok ukur yang paling banyak dipakai untuk mengukur keberhasilan perekonomian suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut Ace Partadiredja (1977;37), Produk Domestik Regional Bruto adalah nilai pasar hasil produksi barang-barang dan jasa –jasa orang-orang dan perusahaan. Sedangkan dinamakan domestik karena batasnya adalah suatu wilayah atau negara, sehingga didalamnya termasuk hasil-hasil produksi barang-barang dan jasa-jasa perusahaan serta orang asing yang berada di Indonesia. Dinamakan produk karena yang dihitung adalah produksi barang-barang dan jasa-jasa. Untuk Produk Domestik Regional Bruto, regional menunjukkan batas suatu daerah (region) didalam batas antara suatu negara, dalam hal ini adalah Propinsi (Ace Partadiredja, 1977;71).

Ditinjau dari berbagai segi, Produk Domestik Regional Bruto mempunyai beberapa pengertian. Biro Pusat Statistik (BPS 2002 ; 1) menjelaskan sebagai berikut:

- a. Dari segi produksi, PDRB adalah jumlah nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit produksi yang dimiliki oleh penduduk suatu wilayah selama periode satu tahun.
- b. Dari segi pendapatan, PDRB adalah balas jasa faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk suatu wilayah yang ikut serta dalam proses produksi selama satu tahun.

- c. Dari segi pengeluaran, PDRB adalah pengeluaran konsumsi dilakukan oleh rumah tangga, lembaga-lembaga sosial, pemerintah, pembentukan modal tetap, kenaikan stock dan ekspor netto suatu wilayah selama periode satu tahun.

Pendapatan Regional atau Produk Domestik Regional Bruto baik secara keseluruhan maupun secara sektoral umumnya disajikan dalam dua bentuk yaitu penyajian atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Pertama atas dasar harga berlaku, yaitu besaran dari nilai tambah bruto masing-masing sektor, sesuai dengan keadaan pada tahun yang sedang berjalan. Dalam hal ini penyajian masih dipengaruhi oleh adanya faktor inflasi atau deflasi. Kedua atas dasar harga konstan, yaitu penyajian semua barang dan jasa yang dihasilkan, biaya antara yang digunakan ataupun nilai tambah masing-masing sektor dinilai berdasarkan harga tetap suatu tahun dasar. Untuk penelitian ini analisa data yang dipakai dalam memberikan gambaran PDRB adalah berdasarkan atas harga konstan.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilaksanakan yaitu diskripsi, yaitu penelitian yang berupaya untuk memberikan gambaran atau penjelasan tentang suatu fenomena dengan merinci indikator-indikator yang mendukung fenomena tersebut tanpa mencari ada tidaknya hubungan antar indikator.

3.1.2 Unit Analisis

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja sektor ekonomi pada masing-masing daerah di Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) Jawa Timur.

3.1.3 Daerah Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) Jawa Timur, dengan pertimbangan letak geografi propinsi Jawa Timur yang strategis dalam pembangunan nasional dan berpeluang besar mendorong dan mendukung pertumbuhan Kawasan Timur Indonesia serta mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan.

3.1.4 Populasi

Populasi dalam penelitian ini diambil seluruh aktivitas sektor ekonomi wilayah antar SWP Jawa Timur secara time series selama kurun waktu 1997 – 2002. Tahun tersebut diambil dengan pertimbangan periode sesudah terjadinya krisis ekonomi, dan periode pasca krisis ekonomi.

3.2 Jenis dan Sumber data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari instansi terkait. Data yang diperoleh terutama data-data terbitan Badan Pusat

Statistik (BPS). Data yang sekunder yang digunakan antara lain PDRB, Jumlah Penduduk, Pendapatan perkapita, mulai dari tahun 1997 – 2002.

3.3 Metode Analisis Data

Dalam Penelitian ini digunakan beberapa metode analisis yang penggunaannya disesuaikan dengan masalah yang diteliti, namun secara utuh metode analisis yang digunakan merupakan suatu kesatuan dalam menjawab masalah yang dikemukakan yaitu :

3.3.1 Indeks Williamson

Untuk menghitung ketimpangan pembangunan antar SWP digunakan rumus indeks Williamson (Williamson, 1965) dengan formulasi sebagai berikut:

$$V_w = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 \cdot \frac{f_i}{N}}}{\bar{y}}$$

Dimana :

V_w = Indeks Williamson

y_i = Pendapatan perkapita di SWP i

\bar{y} = Pendapatan perkapita rata-rata Jawa Timur

f_i = Penduduk dipropinsi i

N = Penduduk total Jawa Timur

n = Jumlah Wilayah

Nilai V_w terletak antara 0 dan 1. Bila Indeks Williamson (V_w) mendekati nol maka suatu wilayah dikatakan sangat merata dan bila Indeks Williamson (V_w) mendekati satu berarti suatu wilayah dikatakan timpang.

3.3.2 Tipologi Klassen

Guna mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah digunakan alat analisis Tipologi Klassen. Sjafrijal, (1997:27-38) menyusun matrik sebagai berikut:

Tabel 3.1. Matrik Klasifikasi Pertumbuhan Ekonomi menurut Tipologi Klassen

Laju Pertumbuhan (r)	PDRB per kapita(y)	
	$y_i < y$	$y_i > y$
$r_i > r$	Daerah berkembang cepat	Daerah cepat maju dan cepat tumbuh
$r_i < r$	Daerah relatif tertinggal	Daerah maju tapi tertekan

Sumber : Prisma (1997: 23)

- Keterangan :
- r_i = Laju pertumbuhan PDRB SWP i
 - r = Laju pertumbuhan total PDRB Jawa Timur
 - y_i = PDRB perkapita SWP i
 - y = PDRB perkapita Jawa Timur

3.4 Definisi Variabel Operasional

Untuk menghindari salah penafsiran dalam penulisan ini serta mencegah terjadinya memperluas permasalahan maka diberikan definisi operasional sebagai berikut :

1. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) yaitu jumlah nilai tambah produk yang ditimbulkan oleh berbagai lapangan usaha yang melakukan usahanya disuatu daerah (region) tertentu tanpa memperlihatkan pemilikan atas dasar faktor produksi selama satu tahun berdasarkan harga konstan 1993 dan dinyatakan dalam rupiah.
2. Jumlah penduduk yaitu Jumlah penduduk pertengahan tahun Propinsi Jawa Timur yang telah registrasi menurut sensus penduduk dalam satuan jiwa.

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Obyek yang diteliti

4.1.1 Keadaan Geografis

Wilayah Jawa Timur yang terbagi menjadi 29 kabupaten dan 9 kota mempunyai bagian wilayah yang berciri khusus, yang meliputi Jawa Timur bagian timur, Madura Kepulauan, Pulau Bawean dan beberapa pulau lainnya. Secara astronomis Wilayah Jawa Timur berada antara 111,0' hingga 114,4' Bujur Timur, dan diantara 7,12' hingga 8 48' Lintang Selatan.

Luas wilayah propinsi Jawa Timur adalah 46.428,57 km², yang secara umum dapat dibagi menjadi 2 bagian besar, yaitu Jawa Timur daratan dan kepulauan Madura. Dimana luas wilayah Jawa Timur daratan hampir mencakup 90 persen dari seluruh luas wilayah propinsi Jawa Timur, sedangkan luas kepulauan Madura hanya sekitar 10 persen.

Dilihat dari segi batas wilayah propinsi Jawa Timur sebelah utara berbatasan dengan laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan laut dan selat Bali, sebelah barat berbatasan dengan wilayah propinsi Jawa Tengah, dan sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia. Dengan kondisi geografis seperti tersebut diatas posisi daerah Jawa Timur menguntungkan karena posisinya memungkinkan terciptanya hubungan yang baik dengan daerah-daerah lain terutama bagian tengah dan bagian timur Indonesia.

4.1.2 Aspek Fisik Wilayah

Struktur tanah di Jawa Timur sebagian besar terdiri dari jenis-jenis aluvial, grumasol, mediteran merah, kuning, regosol, andosol, latosol dan litosol. Berdasarkan ciri-ciri fisik tanahnya, Jawa Timur dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian sebagai berikut :

- (1) Jawa Timur bagian utara dan pulau Madura adalah bagian dari daerah pegunungan kapur utara yang memiliki tanah relatif kurang subur. Sebagian Jawa Timur bagian utara adalah daerah hilir aliran Bengawan Solo yang bersumber di Wonorejo, Jawa Tengah. Setelah bertemu dengan Kali Madiun,

Bengawan solo mengalir melalui daerah-daerah Bojonegoro dan Lamongan, dan akhirnya bermuara dipantai utara kabupaten Gresik;

- (2) Jawa Timur Bagian tengah erupakan daerah depresi yang terisi deretan gunung api dengan jenis tanah yang subur. Dengan sungai-sungai brantas, Madiun, Konto, Pekalen sampean dan sungai-sungai kecil lainnya yang mengalir didaerah ini, maka Jawa Timur Bagian tengah merupakan daerah yang cocok untuk pertanian lahan basah;
- (3) Jawa Timur bagian selatan adalah bagian dari pegunungan Kapur Selatan yang bermula dari Gunung Kidul di Yogyakarta dan membujur sampai ke daerah Malang Selatan. Daerah ini jenis tanahnya batuan kapur yang relatif tandus.

4.1.3 Keadaan penduduk

4.1.3.1 Penduduk

Penduduk Jawa Timur yang mencapai hampir 35,5 juta jiwa pada tahun 2002 menempatkan Jawa Timur sebagai daerah dengan penduduk terbanyak kedua setelah Jawa Barat. Perkembangan dan pertumbuhan penduduk Jawa Timur sejak periode 1997-2002 mengalami naik turun. Tercatat mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2000 sebesar -1,51 persen dan mengalami pertumbuhan tertinggi pada tahun 2001 sebesar 1,25 persen. Pertumbuhan jumlah penduduk per SWP Jawa Timur dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 4.1 Pertumbuhan Penduduk Pertengahan tahun Per SWP Jawa Timur 1997-2002

No	Tahun	Jumlah Penduduk	Pertumbuhan
1	1997	34.682.985	
2	1998	35.000.738	0,92
3	1999	35.318.691	0,91
4	2000	34.783.640	-1,51
5	2001	35.218.819	1,25
6	2002	35.487.507	0,76

Sumber: Dinas Kependudukan Propinsi Jawa Timur.

Persentase terbesar penduduk Jawa Timur pada tahun 2002 terdapat di SWP I (23,65 persen), SWP VII (18,55 persen) dan SWP VI (14,02 persen). Sedangkan Kepadatan penduduk Jawa Timur tahun 2002 adalah 757 jiwa setiap 1

km². Kepadatan penduduk dikota, umumnya lebih tinggi dibanding dengan kepadatan penduduk di kabupaten. Kota Surabaya mempunyai kepadatan penduduk tertinggi yaitu 8.021 jiwa/km².

4.1.3.2 Tenaga Kerja

Penurunan jumlah pencari kerja terjadi pada tahun 2002, yaitu dari 378.894 orang pada tahun 1997 menjadi 326.188 pada tahun 2002. sedangkan pencari kerja yang sudah ditempatkan sebanyak 32.621 orang ditahun 2002. Sementara Jumlah pencari kerja yang belum ditempatkan sebanyak 232.289 atau naik 25,07 persen dari tahun 1997.

Lowongan pekerjaan yang tersedia di Jawa Timur sebanyak 55.974 selama tahun 2002. Dibanding tahun1997 mengalami penurunan sebesar 63,80 persen. Jadi ada kesenjangan antara jumlah pencari kerja dengan jumlah lowongan kerja yang tersedia. Rationya mencapai 1;5,83, yang artinya 1 (Satu) orang pencari kerja diperebutkan lebih dari 5 (Lima) orang pencari kerja. Daftar pencari kerja dan permintaan kerja tahun 1997 dan 2002 propinsi Jawa Timur dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.2 Jumlah pencari kerja dan permintaan tahun 1997 dan 2002

No	Uraian	1997	2002
1	Pencari Kerja	378.894	326.188
2	Penempatan	90.557	32.621
3	Penghapusan pencari kerja	102.615	61.278
4	Belum ditempatkan	185.722	232.289
5	Permintaan, Lowongan	154.656	55.974
6	Dipenuhi	90.557	32.621
7	Penghapusan Lowongan	34.640	11.476
8	Sisa Lowongan	29.459	11.877

Sumber: Kanwil Departemen Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur.

Pemegang ijin bekerja bagi WNA pada tahun 2002 sebanyak 6.625 orang. Naik 2,35 persen dibanding tahun sebelumnya. Terbanyak bergerak di bidang industri pengolahan yang menyerap 3.748 tenaga kerja asing.

4.1.4 Struktur Ekonomi Jawa Timur

Struktur ekonomi suatu daerah sangat ditentukan oleh besarnya kemampuan masing-masing sektor ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Struktur yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh masing-masing sektor tersebut menggambarkan ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari masing-masing sektor

Secara keseluruhan struktur perekonomian Jawa Timur dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 4.3 : Peranan Sektor Ekonomi dalam PDRB Jawa Timur Atas Dasar Harga Berlaku tahun 1999- 2002 (%)

SEKTOR	1999	2000	2001	2002
1 Pertanian	21,77	21,11	21,28	20,87
2 Pertambangan	1,63	2,11	2,03	1,99
3 Industri olahan	27,34	26,88	26,45	26,59
4 Listrik, gas dan air bersih	1,88	2,41	2,70	2,72
5 Konstruksi	4,89	4,70	4,38	4,25
6 Perdag., hotel dan restoran	22,90	23,08	23,71	24,17
7 Pengang. dan komunikasi	6,03	6,27	6,01	6,40
8 Keuangan, pers. dan js perus.	4,03	4,02	4,16	4,07
9 Jasa-jasa	9,54	9,42	9,28	8,96
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Propinsi Jawa Timur 2002

Sampai saat ini sebagian besar kabupaten/kota di wilayah Jawa Timur masih menggantungkan diri pada sektor pertanian dalam penciptaan PDRB. Ini menunjukkan bahwa Jawa Timur masih merupakan wilayah agraris, dimana perekonomiannya sebagian besar masih ditopang oleh sektor pertanian. Pada tahun 1999 peran sektor pertanian terhadap PDRB Jawa Timur sebesar 21,77 persen, dan selanjutnya pada tahun 2002 turun menjadi 20,87 persen. Turunnya peran sektor pertanian pada tahun 2002 dibandingkan dengan tahun 1999 diakibatkan oleh lebih cepatnya pertumbuhan sektor sektor lainnya seperti

perdagangan hotel dan restoran , pertambangan dan penggalan, Listrik, gas dan air bersih dibanding sektor pertanian

Untuk daerah yang masih agraris rata-rata memiliki ciri tersendiri , terutama dalam hal penciptaan PDRB dan percepatan pertumbuhan . Umumnya daerah agraris dalam penciptaan PDRBnya banyak tergantung pada alam, dan rata-rata pertumbuhannya lebih lambat dibanding dengan daerah industri. Berikut tabel peranan sektor pertanian dan tabel peranan sektor industri di masing-masing Kabupaten/kota di Jawa Timur.

Tabel 4.4 Banyaknya Kabupaten/Kota menurut Peranan Sektor Pertanian di Propinsi Jawa Timur Tahun 2002

No	Kontribusi	Kabupaten/Kota	Jml
1	$\leq 9,99$	Kota Kediri, Kota Surabaya, Kota Malang Kota Madiun, Kota Mojokerto, Kota Probolinggo Kab. Sidoarjo, Kota Blitar, Kota Pasuruan	9
2	10,00 – 19,99	Kab. Gresik, Kota Batu	2
3	20,00 – 29,99	Kab. Tulungagung	1
4	30,00 – 39,99	Kab. Malang, Kab. Banyuwangi, Kab. Nganjuk Kab. Kediri, Kab. Jombang	5
5	$\geq 40,00$	Kab. Pamekasan, Kab. Jember, Kab. Trenggalek Kab. Ponorogo, Kab. Situbondo, Kab. Lumajang Kab. Sumenep, Kab. Probolinggo, Kab. Blitar Kab. Bangkalan, Kab. Madiun, Kab. Bondowoso Kab. Ngawi, Kab. Pacitan, Kab. Magetan Kab. Bojonegoro, Kab. Lamongan, Kab. Sampang	18

Sumber: BPS Propinsi Jawa Timur, 2002

Pada tahun 1998 ketika sektor-sektor lain mengalami keterpurukan akibat adanya krisis ekonomi yang mencapai puncaknya pada tahun itu, Sektor pertanian justru menunjukkan kinerja yang impresif. Namun demikian , seiring dengan membaiknya perekonomian, peran sektor pertanian dalam struktur perekonomian jawa timur cenderung mengalami penurunan dari tahun ketahun secara perlahan, tapi pasti.

Peran sektor pertanian pada tahun 1998 kembali meningkat dari sebesar 16,75 persen pada tahun 1997 menjadi 21,24 persen. dan peningkatan ini berlanjut sampai tahun 1999, yaitu sebesar 21,77 persen. Perubahan ini bukan berarti sektor pertanian tumbuh hebat , tetapi semata-mata karena sektor produksi lain jatuh

sangat parah. Selanjutnya sejak tahun 2000 peranan tersebut berangsur-angsur menurun kembali pada tahun 2002 tinggal sebesar 20,87 persen. Tentunya kontribusi terbesar terletak pada subsektor tanaman bahan makanan.

Tabel 4.5 Banyaknya Kabupaten/Kota menurut Peranan Sektor Industri di Propinsi Jawa Timur Tahun 2002

No	Kontribusi	Kabupaten/Kota	Jml
1	≤ 9,99	Kab. Pamekasan, Kab. Sampang, Kab. Lamongan Kab. Bangkalan, Kab. Pacitan, Kab. Trenggalek, Kab. Blitar, Kab. Ponorogo, Kab. Ngawi, Kab. Madiun, Kab. Magetan, Kab. Bondowoso, Kab. Bojonegoro, Kab. Nganjuk, Kab. Jember Kab. Situbondo, Kab. Sumenep, Kab. Lumajang Kota Mojokerto, Kab. Jombang, Kab. Malang Kab. Banyuwangi, Kota Batu	23
2	10,00 – 19,99	Kota Blitar, Kab. Probolinggo Kab. Kediri, Kota Pasuruan, Kab. Tuban Kab. Malang	7
3	20,00 – 29,99	Kab. Kediri, Kota Madiun	2
4	30,00 – 39,99	Kab. Tulungagung, Kota Probolinggo	2
5	≥ 40,00	Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Pasuruan Kab. Sidoarjo, Kab. Gresik, Kota Kediri	6

Sumber: BPS Propinsi Jawa Timur, 2002

Sektor pertambangan dan penggalan, yang sebagian besar didominasi oleh subsektor penggalan, menunjukkan peran yang cenderung menurun. Pada tahun 1997 peranannya hanya berkisar 1,5 persen dan pada tahun 1998 atau pada masa puncak krisis peran tersebut ikut menurun sebesar 0,93 persen. Kemudian peran sektor pertambangan dan penggalan pada tahun 1999 kembali meningkat menjadi 1,63 persen. Pada tahun 2000 peran pertambangan dan penggalan meningkat lagi sedikit menjadi 2,11 persen berbarengan dengan meningkatnya aktifitas penggalan marmer di wilayah tulungagung dan sekitarnya.

Sektor penting dalam membentuk besaran PDRB Jawa Timur adalah sektor industri pengolahan. Kalau pada tahun 1999 sektor industri masih berperan sebesar 27,34 persen, maka pada tahun 2000 peran tersebut menurun sedikit menjadi sebesar 26,88 persen. selanjutnya sampai tahun 2002 ini peranannya hampir tidak bergerak lagi bahkan sedikit lebih mengecil yaitu sebesar 26,59

persen. Bila ditinjau lebih dalam, kontribusi terbesar dalam sektor industri pengolahan diberikan oleh subsektor industri makanan, minuman dan tembakau yang sebagian besar didominasi oleh industri rokok. Pada tahun 2000 peran industri rokok di Jawa Timur hampir mencapai 40 persen dalam struktur industri Jawa Timur, sehingga naik turunnya sektor industri pengolahan hampir bisa dipastikan sangat dipengaruhi oleh gerakan subsektor industri makanan, minuman dan tembakau. Sejak krisis ekonomi yang mencapai puncaknya pada tahun 1998 yang lalu, sektor industri pengolahan berjalan sangat lambat sekali, terutama kelompok makanan, minuman dan tembakau. Demikian juga dengan kelompok industri tekstil, pakaian jadi dan barang dari kulit, sejak tahun 2002 peranannya semakin menurun, yang diakibatkan oleh penurunan produksi.

Meningkatnya permintaan akan energi listrik, gas dan air bersih untuk berkembang. Sejak terjadinya krisis ekonomi yang mencapai puncaknya pada tahun 1998 yang lalu, peran sektor listrik terus meningkat. Kalau pada tahun 1997 hanya sebesar 1,76 persen, maka pada tahun 1998 sampai dengan tahun 2002 peranan rata-rata sudah mencapai 2,60 persen. Pembentukan PDRB sektor listrik, gas dan air bersih lebih banyak didominasi oleh subsektor listrik. Namun demikian perkembangan subsektor gas kota, dan air bersih juga ikut berperan dalam peningkatan peranan. Sejak dibangunnya jaringan gas untuk melayani kegiatan industri di Jawa Timur, subsektor gas kota ini sedikit banyak ikut berperan dalam peningkatan peranan sektor listrik, gas dan air bersih. Kebutuhan gas kota sejak tahun 1999 terus meningkat sehingga peranannya bergerak terus hampir mendekati peranan air bersih yaitu sebesar 0,23 persen.

Struktur Ekonomi antar Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) mengalami pergeseran yang cukup signifikan. Sumbangan ekonomi SWP I terhadap ekonomi Jawa Timur yang pada tahun 1997 sebesar 43,16 persen pada tahun 2002 turun menjadi 41,83. Wilayah SWP I (Sidoarjo, Mojokerto, Lamongan, Gresik, Bangkalan, Kota Mojokerto, dan Kota Surabaya) pada kenyataannya adalah daerah yang padat industri, oleh karena itu sumbangan sektor ini adalah paling besar. Akibat krisis ekonomi dan moneter, penciptaan nilai tambah industri di wilayah tersebut mengalami kontraksi yang sangat signifikan. Pada akhirnya perekonomian secara keseluruhan di wilayah tersebut juga mengalami kontraksi

yang berarti kontraksi di wilayah tersebut paling hebat dibanding dengan wilayah lainnya di Jawa Timur, akibatnya kontribusi ekonomi di wilayah tersebut menjadi menurun.

Selain SWP I yang mengalami penurunan kontribusi ekonomi terhadap Jawa Timur adalah SWP VII (Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Kediri, Jombang, Nganjuk, Kediri, Blitar), Namun demikian penurunan kontribusi pada SWP VII tidak separah yang terjadi di SWP I selain dua SWP (I dan VII), Tujuh SWP lainnya di Jawa Timur mengalami kenaikan kontribusi.

Ketidakteraturan kekuatan ekonomi sektoral di Jawa Timur dapat dipandang sebagai kekuatan ekonomi, apabila kebijaksanaan industrialisasi merata diseluruh daerah maka akibat krisis, kontraksi ekonomi akan semakin hebat. Namun sekarang daerah-daerah yang masih cenderung agraris bahkan dapat dikatakan sebagai bantalan atas hentakan krisis.

4.1.5 PDRB Perkapita

PDRB perkapita merupakan gambaran dari rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun disuatu wilayah / daerah, dan bisa digunakan sebagai salah satu indikator tingkat kemakmuran. Data yang diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB dengan penduduk pertengahan tahun pada tahun yang sama ini akan sangat dipengaruhi oleh besaran dari kedua variabel tersebut. Sebagai gambaran apabila nilai PDRB besar sedangkan jumlah penduduknya sedikit maka rata-rata PDRB perkapitanya akan menjadi besar. Sebaliknya apabila nilai PDRB kecil, sedangkan jumlah penduduknya banyak, maka PDRB perkapitanya akan menjadi kecil. Oleh karena itu besar kecilnya PDRB perkapita dapat menjadi ukuran kemakmuran suatu daerah, sekalipun data tersebut tidak dapat digunakan langsung sebagai pengukuran pemerataan pendapatan daerah tersebut.

PDRB perkapita diseluruh kabupaten/kota se Jawa Timur pada tahun 1999 sampai dengan 2002 rata-rata menunjukkan kenaikan yang cukup tinggi.

4.2 Analisis Data

4.2.1 Analisis Indeks Williamson

Untuk mewakili gambaran yang lebih mewakili tentang pemerataan pembangunan antar daerah digunakan Indeks Williamson yang didasarkan pada PDRB perkapita masing-masing daerah dikaitkan dengan posisi relatif penduduk daerah tersebut. Indeks Williamson ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kesenjangan disparitas (kesenjangan) antar Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) yang ada di propinsi Jawa Timur, Kesenjangan pendapatan yang dimaksud bukanlah kesenjangan pendapatan perorang tetapi kesenjangan pendapatan suatu daerah, sebab alat ukur yang digunakan berbeda, untuk kesenjangan antar penduduk lazim digunakan Gini Ratio.

Dengan menggunakan data statistik terlihat bahwa tingkat ketimpangan antar SWP di Jawa Timur yang ditunjukkan oleh pendapatan perkapita masing-masing SWP sangat bervariasi. Pendapatan perkapita rata-rata tertinggi adalah SWP I (2.939.330,7) sedangkan terendah adalah SWP II (Rp 844.502,41). Sedangkan dari tingkat pertumbuhan yang dicapai ternyata terjadi kebalikan yaitu bagi daerah dengan tingkat pendapatan perkapita tinggi mengalami pertumbuhan yang rendah sementara daerah dengan tingkat pendapatan perkapita rendah mengalami pertumbuhan yang relatif tinggi.

Tabel 4.6 : Hasil Perhitungan Indeks Williamson antar satuan Wilayah Pembangunan (SWP) Jawa Timur tahun 1997 – 2002

No	Tahun	Indeks Williamson
1	1997	0,497
2	1998	0,459
3	1999	0,436
4	2000	0,448
5	2001	0,450
6	2002	0,457
Rata-rata Jawa Timur		0,458

Sumber : Biro Pusat Statistik Jawa Timur, data diolah, 2004 (Lampiran 5 – 10)

Dengan menggunakan Indeks Williamson (Vw) Kesenjangan antar Satuan Wilayah pembangunan (SWP) Jawa Timur dapat dilihat pada Tabel 4.6, Seberapa besar tingkat kesenjangan suatu daerah dapat dilihat dari Indeks Williamsonnya. jika indeks Williamson mendekati 0 (nol) berarti kesenjangan kecil, sebaliknya apabila mendekati 1 (satu) berarti kesenjangan semakin besar.

Dari hasil perhitungan dapat dilihat bahwa Indeks Williamson antar SWP propinsi Jawa Timur tahun 1997-2002 sebesar 0,450 – 0,497, kesenjangan pendapatan pada tahun 1997 lebih tinggi daripada tahun-tahun sesudahnya yaitu sebesar 0,497 sedangkan tahun 1999 memiliki nilai yang paling kecil yaitu sebesar 0,435. Indeks Williamson rata-rata pada Satuan Wilayah Pembangunan Jawa Timur dari tahun 1997-2002 adalah 0,458.

Tabel 4.7 : Hasil analisis perhitungan Indeks Williamson rata-rata Tahun 1997-2002 antar Kabupaten / Kota dalam Satu Satuan Wilayah Pembangunan Jawa Timur

No	SWP	Rata-rata Indeks Williamson
1	SWP I	0,714
2	SWP II	0,109
3	SWP III	0,059
4	SWP IV	0,136
5	SWP V	0,359
6	SWP VI	0,421
7	SWP VII	0,838
8	SWP VIII	0,373
9	SWP IX	0,332

Sumber : Biro Pusat Statistik Jawa Timur, data diolah, 2004 (Lampiran 11 -16)

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada uraian terdahulu , bahwa cepat dan lambatnya pertumbuhan ekonomi suatu wilayah/daerah dapat mengakibatkan disparitas / kesenjangan antara daerah satu dengan yang lain. Pada umumnya kesenjangan pendapatan antar daerah dapat terjadi karena adanya satu atau beberapa daerah yang mendominasi dan adanya suatu daerah yang tidak mendominasi pada suatu wilayah yang sama. Dominasi yang dimaksud disini

yaitu tingkat pendapatan daerah. Beberapa daerah mungkin diharapkan mampu menarik perkembangan daerah lainnya .

Williamson menyatakan bahwa semakin pesatnya pertumbuhan ekonomi dimana dukungan sektor industri sangat besar , maka jika daerah belum mampu mengikuti derap langkahnya tentunya akan terjadi disparitas / kesenjangan yang akan terus melebar pada perekonomian itu, karena daerah tidak mampu lagi berpacu . Untuk itu penelitian ini mencoba menganalisis indeks Williamson antar Kabupaten /Kota dalam satu SWP.

Dari angka-angka dalam tabel 4.7 dapat kita lihat bahwa rata-rata kesenjangan terbesar dialami oleh SWP VII (Kab. Trenggalek, Kab. Tulungagung, Kab Blitar, Kab. Kediri, Kab Jombang, Kab. Nganjuk, Kota Kediri, Kota Blitar) dan SWP I (Kab. Sidoarjo, Kab. Mojokerto, Kab Lamongan, Kab Gresik, Kab. Bangkalan, Kota Mojokerto , Kota Surabaya) .Sedangkan kesenjangan yang paling kecil dialami oleh SWP II(Kab.Sampang, Kab. Pamekasan, Kab. Sumenep) dan SWP IV (Kab. Jember, Kab Bondowoso, Kab Situbondo). Dengan demikian dapat diketahui bahwa pertumbuhan yang pesat dari daerah tersebut mengakibatkan adanya kesenjangan yang cukup lebar. Yang merupakan konsekwensi logis dari pertumbuhan yang pesat dan pada sisi lain pemerataan menjadi korban.

4.2.2 Analisis Tipologi Klassen

Analisis tipologi Klassen digunakan untuk mengetahui pola pertumbuhan ekonomi Satuan Wilayah pembangunan (SWP) Jawa Timur. Untuk mengetahui hasil analisis pola dan struktur pertumbuhan ekonomi di Satuan Wilayah Pembangunan Jawa Timur dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa terdapat 1 Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) di Jawa Timur yang termasuk daerah maju tetapi tertekan pada kuadran IV yaitu Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) I, yaitu Gerbang Kertausila. Selain itu terdapat tiga Satuan Wilayah Pembangunan yang termasuk daerah berkembang cepat pada kuadran II yaitu : SWP II, SWP V, dan SWP VII

Tabel 4.8 Matrik Klasifikasi Hasil analisis Tipologi kelas antar SWP Propinsi Jawa Timur 1997-2002

PDRB per kapita(y) Laju Pertumbuhan (r)	$y_i < y$	$y_i > y$
$r_i > r$	SWP II SWP V SWP VII	-
$r_i < r$	SWP III SWP IV SWP VI SWP VIII	SWP I

Sumber: Data diolah.2004

Daerah yang merupakan daerah relatif tertinggal pada kuadran III dimana pendapatan perkapita dan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah lebih rendah dibanding rata - rata Jawa Timur , yaitu: SWP III, SWP IV, SWPVI, dan SWP VIII.

Dari kesembilan Satuan Wilayah pembangunan yang terdapat di Jawa Timur ternyata tidak ada satu pun wilayah pembangunan yang termasuk daerah cepat maju dan cepat tumbuh pada kuadran I.

4.3 Pembahasan

Ketimpangan hasil-hasil pembangunan di Indonesia selama ini berlangsung dalam berbagai bentuk, aspek atau dimensi. Bukan semata-mata berupa ketimpangan sektoral yaitu antar berbagai sektor ekonomi tetapi juga berupa ketimpangan spasial (antar daerah) dan ketimpangan regional.

Salah satu penyebab utama terjadinya ketimpangan antar daerah adalah adanya perbedaan dalam laju pertumbuhan PDRB yang mana dalam hal ini dapat mempengaruhi terhadap tingkat pendapatan perkapita. meskipun kita sadari bahwa perbedaan PDRB antar daerah itu juga merupakan bawaan alam yang disebabkan adanya perbedaan potensi alam dan proses pelaksanaan pembangunan yang

waktunya tidak sama. Kalau semua daerah tidak sama besarnya dan tidak mengalami tingkat pertumbuhan yang sama, maka sistem regional sebagai suatu keseluruhan akan memperlihatkan suatu tingkat ketidak-seimbangan, dan satu atau dua daerah akan mendominasi daerah lainnya.

Besar kecilnya kesenjangan antar kawasan mampu memperlihatkan tingkat intensitas pengaruh suatu kawasan. Hirschman berpendapat bahwa kemajuan ekonomi tidak terjadi diberbagai tempat pada waktu yang sama dan apabila disuatu wilayah terjadi pembangunan maka akan terdapat daya tarik yang kuat yang akan menciptakan konsentrasi pembangunan ekonomi disekitar wilayah pembangunan tersebut bermula.

Indeks Williamson antar Satuan Wilayah Pembangunan Jawa Timur kurun waktu Enam tahun terakhir ini dari tahun 1997-2002 menunjukkan adanya kesenjangan yang relatif rendah dan mengalami fluktuatif yang tidak terlalu besar. Kesenjangan tersebut merupakan salah satu indikator dari interaksi keruangan, Hal ini sesuai dengan pendapat Perroux bahwa pertumbuhan tidak terjadi disembarang tempat dan juga tidak secara serentak, tetapi pertumbuhan terjadi pada titik-titik atau kutub-kutub perkembangan dengan intensitas yang berubah-ubah, lalu pertumbuhan itu menyebar sepanjang saluran yang beraneka ragam terhadap keseluruhan ekonomi.

Dari perhitungan yang dilakukan untuk mencari indeks williamson antar Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) Jawa Timur dari tahun 1997-2002, kesenjangan tertinggi terjadi pada tahun 1997 yaitu sebesar 0,497 dimana tahun tersebut kondisi perekonomian bangsa Indonesia masih stabil belum terkena krisis moneter, Sehingga wilayah-wilayah yang mempunyai sumbangan (kontribusi) ekonominya pada sektor sekunder (industri) mempunyai tingkat PDRB cukup tinggi dibanding dengan Wilayah-wilayah yang mengandalkan sektor primer (pertanian). Akibatnya kesenjangan antar wilayah-wilayah tersebut kelihatan cukup besar. Penurunan angka indeks yang terjadi antar Satuan Wilayah Pembangunan Jawa Timur ini disebabkan karena penciptaan nilai tambah industri diwilayah padat industri seperti di SWP I (Gerbang Kertausila) mengalami kontraksi yang sangat signifikan, diakibatkan krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia pada umumnya dan Jawa Timur pada khususnya. Seperti

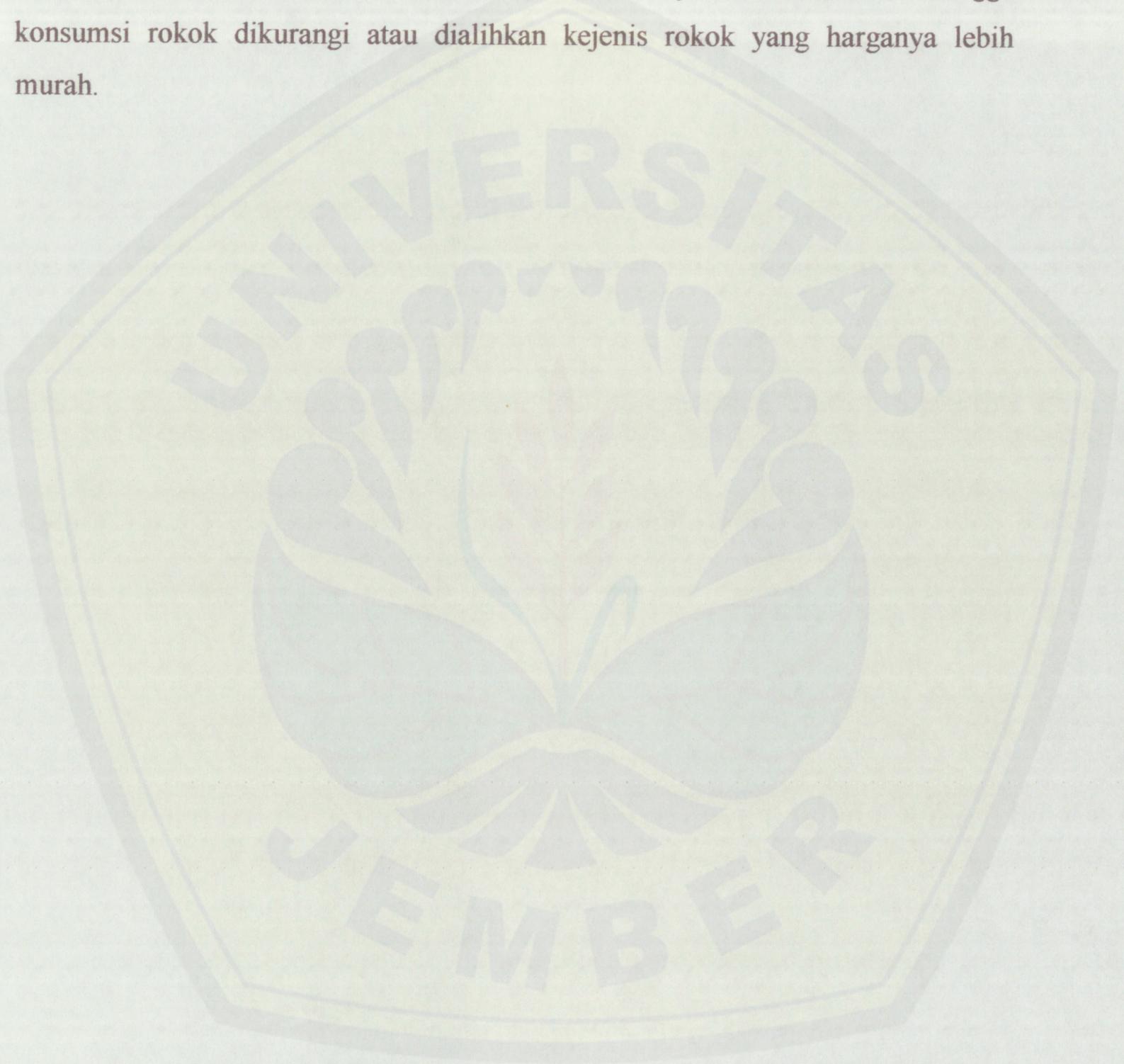
diketahui bahwa daerah-daerah yang padat sektor sekunder dan sektor tersier terutama industri berskala besar lebih merasakan krisis karena ketergantungan ekonomi dengan luar negeri sangat besar, Yang akhirnya perekonomian secara keseluruhan di wilayah tersebut mengalami kontraksi yang berarti dan paling hebat dibanding wilayah lain di Satuan Wilayah Pembangunan Jawa Timur. Berbeda dengan wilayah yang mengandalkan sektor primer (pertanian) perekonomiannya relatif tahan terhadap krisis dan kontraksi sektor primer tidak sehebat sektor sekunder (industri), Sehingga kesenjangan antar wilayah yang ada semakin menurun seiring dengan menurunnya tingkat kesejahteraan terutama wilayah padat industri. Hal ini sesuai dengan pendapat Williamson bahwa semakin pesat pertumbuhan ekonomi dimana dukungan sektor industri sangat besar, maka jika suatu daerah tertentu belum mampu mengikuti pertumbuhan daerah lainnya yang lebih maju akan terjadi disparitas yang akan terus melebar, Karena disamping daerah tersebut menunjang untuk mengejar pesatnya pertumbuhan wilayah, juga daerah tersebut akan ditinggal oleh penduduk yang lebih produktif untuk berpindah pada daerah yang memberikan lapangan kerja lebih baik. Jika hal itu terjadi maka jelaslah bahwa daerah yang terbelakang akan semakin tertinggal karena yang tinggal di daerah tersebut hanyalah orang-orang yang tidak produktif yang tidak mempunyai kekuatan atau daya guna membangun daerahnya. Sedangkan daerah yang maju terutama daerah dimana dukungan sektor industri sangat besar akan semakin berkembang karena banyak tenaga produktif tinggal di daerah tersebut yang datang dari daerah-daerah lain. Untuk itu dalam analisis ini mencoba menghitung kesenjangan antar kabupaten dalam satu Satuan Wilayah Pembangunan Jawa Timur. Dari hasil analisis tersebut diketahui bahwa kesenjangan terjadi pada suatu wilayah dimana sektor sekunder atau industri mengalami kemajuan, dan kesenjangan menurun ketika suatu daerah mengalami kenaikan di sektor pertanian. Ternyata Indeks Williamson terbesar dialami SWP VII (Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Kediri, Jombang, Nganjuk, Kota Kediri, Kota Blitar), dimana wilayah ini terdapat kota Kediri yang mempunyai andalan perekonomian di sektor industri dan mempunyai pertumbuhan yang tinggi, di kota Kediri peran sektor industri Pengolahan dalam struktur PDRB adalah terbesar dibanding kabupaten/kota lainnya yaitu lebih dari 40,00 persen

.sebaliknya di sektor pertanian mengalami penurunan dan mempunyai peranan \leq 9,99 persen dalam penyumbang PDRB di Jawa Timur. Dari pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah SWP VII termasuk daerah berkembang cepat yaitu daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi, tetapi tingkat pendapatan perkapita lebih rendah dibanding rata-rata SWP di Jawa Timur. Indeks Williamson terbesar kedua yaitu SWP I (Gerbangkertasusila), dimana daerah ini termasuk daerah maju tapi tertekan yaitu memiliki pendapatan perkapita lebih tinggi, tetapi tingkat pertumbuhannya lebih rendah dibanding rata-rata SWP di Jawa Timur. Daerah ini mempunyai peranan di sektor industri lebih dari 40,00 persen, khususnya kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik yang memiliki industri pupuk dan semen sebagai andalan, sebaliknya di sektor pertanian mempunyai peran dibawah 10 %. Sedangkan Indeks Williamson terkecil dialami oleh SWP II (Sampang, Pamekasan, Sumenep) dan SWP IV (Jember, Bondowoso, Situbondo) di mana kedua wilayah ini perekonomiannya masih sangat bergantung pada sektor pertanian dan mempunyai peran lebih dari 40,00 persen terhadap perekonomian Jawa Timur, karena kondisi sumber alam yang tersedia di daerah tersebut mendukung terbentuknya sektor pertanian sebagai sektor ekonomi utama . dilihat dari tipologi Klassen SWP II termasuk daerah berkembang dengan cepat, sedangkan SWP IV merupakan daerah relatif tertinggal.

Kesenjangan di Satuan Wilayah Pembangunan Jawa Timur terdapat di lokasi industri menengah besar dengan tingkat pendapatan tinggi yang hanya dinikmati golongan tertentu saja, sehingga menimbulkan kesenjangan yang semakin melebar, ini berbeda dengan wilayah yang mengandalkan sektor pertanian dalam perekonomiannya dengan tingkat pendapatan yang rendah dan dinikmati secara merata oleh masyarakat di daerah tersebut, sehingga kesenjangan di daerah tersebut mengecil, karena *Value added* yang ditimbulkan kecil.

Pertumbuhan pada semua Satuan Wilayah Pembangunan pada tahun 1998 cenderung negatif , dikarenakan depresi ekonomi secara makro. Pertumbuhan berangsur-angsur mulai menunjukkan angka pertumbuhan yang positif mulai tahun 1999. Adapun SWP yang justru mengalami pertumbuhan yang negatif pada tahun 1999 dan 2001 sebesar -1,32 dan -2,83 adalah SWP II (Sampang,

Pamekasan, Sumenep). Hal ini disebabkan ketiga daerah ini merupakan daerah tertinggal tidak memiliki sumberdaya baik alam maupun manusia yang memadai sehingga pertumbuhan ekonomi terhambat. Untuk tahun 2002 yang mengalami pertumbuhan negatif adalah SWP VII, Karena disebabkan SWP ini terdapat kota kediri yang mempunyai andalan industri rokok dan pada tahun 2002 mengalami penurunan produksi yang disebabkan daya beli masyarakat menurun, sehingga konsumsi rokok dikurangi atau dialihkan kejenis rokok yang harganya lebih murah.





V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian mengenai Analisis Kesenjangan Pembangunan Ekonomi antar Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) Jawa Timur menunjukkan hasil sebagai berikut

1. Dari nilai Indeks Williamson tahun 1997-2002 menunjukkan bahwa terjadi kesenjangan pendapatan di Satuan Wilayah Pembangunan Jawa Timur Walaupun tidak terlalu parah. Nilai Indeks Williamson SWP Jawa Timur tahun 1997-2002 berturut-turut adalah : 0,497; 0,459; 0,436; 0,448; 0,450; 0,457. Kesenjangan yang terjadi selama kurun waktu enam tahun terakhir ini relatif rendah dan mengalami fluktuatif yang tidak terlalu besar. Hal ini dikarenakan dampak dari krisis ekonomi dan moneter yang melanda indonesia pada pertengahan 1998 lalu, dimana tingkat kesenjangan antara daerah yang mengandalkan sektor primer dengan daerah yang mengandalkan sektor sekunder semakin menurun. Hal ini dikarenakan pekonomian secara keseluruhan diwilayah tersebut juga mengalami kontraksi yang berarti, terutama daerah yang padat industri karena penciptaan nilai tambah industri di wilayah tersebut mengalami kontraksi yang sangat signifikan akibat tingkat ketergantungan terhadap luar negeri sangat kuat. Kontraksi yang dialami pada daerah-daerah yang mengandalkan sektor sekunder (industri dan tersier paling hebat dibanding dengan wilayah lain, Akibatnya kontribusi ekonomi di wilayah tersebut menjadi menurun . Sedangkan daerah daerah yang mengandalkan sektor primer (pertanian) perekonomiannya relatif lebih tahan terhadap krisis .Hal ini menunjukkan Wilayah yang memiliki sektor industri dengan tingkat pendapatan tinggi cenderung memiliki tingkat kesenjangan yang cukup tinggi. Hal ini dibuktikan dengan menganalisa kesenjangan antar Satuan Wilayah Pembangunan jawa Timur, ternyata indeks Williamson rata-rata tertinggi terdapat pada SWP VII dan SWP I yang notabene daerah tersebut terdapat lokasi industri yang

berkembang dengan pesat dan sektor pertanian berperan sangat rendah dalam perekonomian daerahnya. Sebaliknya kesenjangan mengecil pada daerah-daerah yang mengandalkan sektor primer/pertanian pada perekonomiannya, seperti SWP II dan SWP IV.

2. Pola dan struktur pertumbuhan SWP di Jawa Timur terbagi dalam tiga daerah yang sebagian besar adalah daerah relatif tertinggal yaitu daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan rendah dan PDRB perkapita dibawah rata-rata pendapatan perkapita propinsi Jawa Timur dan sebagian lagi adalah daerah berkembang cepat. Dari hasil analisa dapat diketahui terdapat Tiga (3) SWP yang merupakan daerah berkembang cepat yakni daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi tetapi PDRB perkapitanya dibawah rata-rata pendapatan perkapita Jawa Timur terdapat pada Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, kabupaten Sumenep, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kabupaten Kediri, Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, Kota Kediri, kota Blitar. Empat (4) SWP adalah daerah relatif tertinggal Yaitu Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kota Situbondo, Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kota Malang, Kota Pasuruan, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Madiun. Satu SWP adalah daerah maju tetapi tertekan yaitu daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi tetapi pendapatan PDRB perkapita rata-rata dibawah Jawa Timur yaitu Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kota Mojokerto, Kota Surabaya. Ternyata tidak ada satu SWP-pun yang termasuk daerah maju. Ada kecenderungan hal ini disebabkan Wilayah-wilayah yang pada masa sebelum krisis moneter mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi akibat krisis menjadi wilayah-wilayah yang kontraksinya cenderung paling tinggi. Sehingga kontribusi ekonomi terhadap Jawa Timur mengalami penurunan.

5.2 Saran

1. Supaya Pembangunan Tidak hanya menumpuk disuatu daerah yang menjadikan daerah tersebut semakin Eksklusif dan semakin jauh dari daerah lain pemerintah daerah perlu menerapkan kebijaksanaan. Kebijakan tersebut dapat dilakukan baik dengan cara mencegah aglomerasi pada daerah tertentu, maupun dengan mendorong timbulnya pusat pertumbuhan pada daerah tertentu.
2. Perlunya penyebaran Alokasi dana dan investasi yang seimbang dan proporsional antara daerah maju dengan wilayah terbelakang. Sehingga dualisme wilayah yang mengakibatkan daerah yang relatif maju semakin maju dan daerah yang masih terbelakang makin sukar untuk berkembang dapat dikurangi.
3. Perlunya pemanfaatan secara optimal sektor basis yang dimiliki suatu wilayah yang merupakan potensi daerah tersebut agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah terbelakang sehingga pertumbuhan ekonomi yang ada tidak menimbulkan ketimpangan ekonomi.
4. Perlunya daerah memiliki industri yang mendukung pertanian dan tidak tergantung luar negeri , karena kebanyakan wilayah di Jawa Timur cenderung agraris dan terbukti sektor ini relatif tahan terhadap krisis.
5. Perlunya dukungan kebijaksanaan yang mampu mempercepat proses relokasi industri dari kawasan yang relatif maju ke wilayah terbelakang yang pertumbuhan ekonominya kurang.
6. Perlunya perbaikan infra struktur dan sarana prasarana wilayah yang akan mendukung pertumbuhan sektor sekunder dan tersier sekaligus mampu menampung pergeseran dari sektor lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincolin, 1999. **Ekonomi Pembangunan Edisi Ke-3**, STIE-YKPN, Yogyakarta .
- Arifin Z, 2003, **Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Antar Kabupaten Di Jawa Timur**, Tesis tidak dipublikasikan, Unmuh Malang.
- Basri, Faisal, 1994. **Perekonomian Indonesia Menjelang Abad XXI**, Erlangga, Jakarta.
- BPS Jatim dan BAPPERROP Jatim, 2002, **PDRB menurut Kabupaten/Kota Se Jawa timur 1998-2001**, Surabaya
- BPS Jatim dan BAPPERROP Jatim, 2003, **PDRB menurut Kabupaten/Kota Se Jawa timur 1999-2002**, Surabaya
- BPS. 1999, **PDRB menurut Kab/Kota Se Jawa Timur 1995-1998**
- BPS. 2002, **Statistik Indonesia**, Jakarta
- Dick, Howard, Fox, James, Mackie, Jamie; Alih Bahasa, Bambang Sumantri, 1997. **Pembangunan Yang Berimbang: Jawa Timur Dalam Era Orde Baru**, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Glasson, Jhon, 1990. **Pengantar Perencanaan Regional**; Alih bahasa Paul Sitohang, LPFE-UI, Jakarta.
- Hadjisaroso, Poernomosidi, 1980. **Konsepsi Dasar Pengembangan Wilayah Di Indonesia**, Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta.
- Hartono, Imam. B, 1996, **Kesenjangan Pendapatan antar Daerah Di Jawa Timur**, FE UNEJ, Jember
- Jhingan, ML, 1996, **Ekonomi Pembangunan dan perencanaan**, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Kadariah, 1978. **Ekonomi Perencanaan**, Lembaga Pendidikan FE UI, Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad, 2002, **Analisis Spasial dan Regional "Studi Aglomerasi dan Kluster Industri Indonesia"**, AMP YKPN, Yogyakarta.
- Lewis, Arthur W, 1994, **Perencanaan Pembangunan: Dasar-dasar kebijaksanaan Ekonomi**, Rineka Cipta, Jakarta.

- Nursyaman, 1996. **Pengembangan konsep Pusat Pertumbuhan Terhadap Wilayah Kepulauan Indonesia**, Media Ekonomi Tri sakti; Jakarta.
- Partadireja, Ace, 1977. **Pengantar Ekonomika**, BPFE-UGM, LP3ES, Jakarta.
- Richardson, HW, 1991. **Dasar-Dasar Ekonomi Regional**. Terjemahan Paul Sihotang, LPFE-UI, Jakarta.
- Rudi Wibowo, Soetrisno, 2002. **Konsep dan Landasan Analisis Wilayah**, Jurusan Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Jember.
- Spillane, James J, Usman, Wan, 1993. **Materi Pokok Ekonomi Regional**. Universitas Terbuka Karunika, Jakarta.
- Sunoto , Daryono Soebagio, 1999, **Analisis Disparitas Pembangunan Ekonomi Dati II di indonesia**, FE Universitas Bengkulu.
-, 1997, **Pertumbuhan Ekonomi dan ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat**, **Prisma Volume XV**, Jakarta

Lampiran 1 Jumlah Penduduk Pertengahan tahun Per Satuan Wilayah Pembangunan Jawa Timur 1997-2002 (Jiwa)

Satuan Wilayah Pembangunan	1997	1998	1999	2000	2001	2002
SWP I	8128701	8259649	8420511	8185618	8288494	8393470
SWP II	2438807	2463994	2490583	2425308	2442539	2459899
SWP III	1494419	1499144	1499232	1488877	1492425	1495982
SWP IV	3427752	3445443	3456019	3480618	3500512	3520520
SWPV	2129024	2144395	2157488	2161977	2177417	2192982
SWP VI	4664010	4723887	4792520	4705893	4925764	4976324
SWP VII	6531341	6566898	6589790	6517755	6550225	6582899
SWP VIII	3655738	3665540	3663148	3599729	3608987	3618285
SWP IX	2213193	2231788	2249400	2217865	2232456	2247146
Jawa Timur	34682985	35000738	35318691	34783640	35218819	35487507

Lampiran 2 PDRB per Satuan Wilayah pembangunan Jawa Timur tahun 1997-2002 (Jutaan Rupiah)

Satuan Wilayah Pembangunan	1997	1998	1999	2000	2001	2002
SWP I	27989894,38	22311904,85	22503472,35	23347718,35	24275610,84	25497276,51
SWP II	2203890,80	2045021,53	2018101,39	2070824,32	2012222,77	2079647,53
SWP III	1923242,34	1676582,84	1680755,81	1738888,34	1797170,97	1854001,42
SWP IV	3405277,68	3044429,99	3091857,12	3188534,25	3323656,15	3461468,82
SWPV	3023552,61	2583363,13	2599794,43	2650232,52	2727279,3	2835531,77
SWP VI	8371488,19	7082541,27	7167415,53	7390435,73	7873697,33	8151449,64
SWP VII	6531341	10334216,54	10459108,59	10755102,87	10985977,81	10895220,84
SWP VIII	11689828,15	3089751,88	3137627,17	3258417,15	3368111,24	3496557,89
SWP IX	3480905,79	2231084,71	2400838,10	2456367,29	2570882,46	2676783,44
Jawa Timur	64853575,88	54398896,74	55058970,49	56856520,82	58934608,87	60947937,86

Lampiran 4 Analisis laju Pertumbuhan Ekonomi Rata-rata Satuan Wilayah pembangunan Jawa Timur 1997-2002(Persen)

Satuan Wilayah Pembangunan	1997	1998	1999	2000	2001	2002	Rata-rata Pertumbuhan
SWP I	5,63	-20,29	0,86	3,75	3,97	5,03	-1,34
SWP II	5,51	-7,21	-1,32	2,61	-2,83	3,35	-1,08
SWP III	2,38	-12,83	1,25	3,46	3,35	3,16	-0,52
SWP IV	2,06	-10,60	1,56	3,13	4,24	4,15	0,50
SWP V	4,47	-14,56	0,64	1,94	2,91	3,97	-1,02
SWP VI	4,50	-15,40	1,20	3,11	6,54	3,53	-0,20
SWP VII	6,60	-11,60	1,21	2,83	2,15	-0,83	-1,25
SWP VIII	3,61	-11,24	1,55	3,85	3,37	3,81	0,27
SWP IX	1,68	-19,32	7,61	2,31	4,66	4,12	-1,12
Jawa Timur	5,02	-16,12	1,21	3,26	3,65	3,42	-0,92

Lampiran 5 Hasil Perhitungan Indeks Williamson antar Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) Jawa Timur tahun 1997
 Note:
 Populasi total Jawa Timur (N) : 34.682.985

Pendapatan perkapita rata-rata Jawa Timur (\bar{y}) : 1,869896027

Rumus :

$$V_w = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 \cdot \frac{f_i}{N}}}{\bar{y}}$$

Satuan Wilayah Pembangunan (SWP)	Jumlah penduduk pertengahan tahun (fi)	PDRB (Jutaan Rupiah)	Pendapatan Perkapita (yi) (Jutaan Rupiah)	(yi - \bar{y}) ²	fi/N	(yi - \bar{y}) ² · fi/N	Σ
SWP I	8.128.701	27.989.894,38	3,443341609	2,475730998	0,234371436	0,580240629	
SWP II	2.438.807	2.203.890,80	0,903675772	0,933581581	0,070317102	0,065646751	
SWP III	1.494.419	1.923.242,34	1,286949871	0,339826221	0,043087957	0,014642417	
SWP IV	3.427.752	3.405.277,68	0,993443423	0,768169167	0,098830939	0,07591888	
SWP V	2.129.024	3.023.552,61	1,420159007	0,202263387	0,061385258	0,01241599	0,86415807
SWP VI	4.664.010	8.371.488,19	1,794912144	0,005622582	0,134475449	0,000756099	
SWP VII	6.531.341	11.689.828,15	1,78980521	0,006414539	0,188315423	0,001207956	
SWP VIII	3.655.738	3.480.905,79	0,952175946	0,842210147	0,105404364	0,088772624	
SWP IX	2.213.193	2.765.495,93	1,249550279	0,384828847	0,063812068	0,024556724	
Jawa Timur	34.682.985	64.853.575,87	1,869896027				

$V_w 1997 = 0,49714049$

Lampiran 6 Hasil Perhitungan Indeks Williamson antar Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) Jawa Timur tahun 1998

Note:

Populasi total Jawa Timur (N) : 35.000.738

Pendapatan perkapita rata-rata Jawa Timur (\bar{y}) : 1,554221421

Rumus :

$$V_w = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 \cdot \frac{f_i}{N}}}{\bar{y}}$$

Satuan Wilayah Pembangunan (SWP)	Jumlah penduduk pertengahan tahun (fi)	PDRB (Jutaan Rupiah)	Pendapatan Perkapita(yi) (Jutaan Rupiah)	(Yi - \bar{y}) ²	fi/N	(yi - \bar{y}) ² · fi/N	Σ
SWP I	8.259.649	22.311.904,85	2,701313924	1,31582121	0,235984995	0,310514062	
SWP II	2.463.994	2.045.021,53	0,829962057	0,524551626	0,070398344	0,036927565	
SWP III	1.499.144	1.676.582,84	1,118360104	0,189975087	0,042831782	0,008136971	
SWP IV	3.445.443	3.044.429,99	0,883610609	0,449718861	0,098439152	0,044269943	0,509731609
SWP V	2.144.395	2.583.363,13	1,204704884	0,600807798	0,061267136	0,036809773	
SWP VI	4.723.887	7.082.541,27	1,499303703	0,003015955	0,134965354	0,000407049	
SWP VII	6.566.898	10.334216,54	1,573683121	0,000378757	0,187621701	0,000071063	
SWP VIII	3.665.540	3.089.751,88	0,842918609	0,50595169	0,104727506	0,052987058	
SWP IX	2.231.788	2.231.084,71	0,999684876	0,307510779	0,063764026	0,019608125	
Jawa Timur	35.000.738	54.398.896,74	1,554221421				

V_w 1998 = 0,459364989

Lampiran 7 Hasil Perhitungan Indeks Williamson antar Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) Jawa Timur tahun 1999
 Note:

Populasi total Jawa Timur (N) : 35.318.691

Pendapatan perkapita rata-rata Jawa Timur (\bar{y}) : 1,558918774

Rumus :

$$V_w = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 \cdot \frac{f_i}{N}}}{\bar{y}}$$

Satuan Wilayah Pembangunan (SWP)	Jumlah penduduk pertengahan tahun (fi)	PDRB (Jutaan Rupiah)	Pendapatan Perkapita(yi) (Jutaan Rupiah)	(Yi - \bar{y}) ²	fi/N	(yi - \bar{y}) ² · fi/N	Σ
SWP I	8.420.511	22.503472,35	2,67245231	1,239972349	0,238415149	0,295628192	
SWP II	2.490.583	2.018.101,39	0,810292766	0,560440899	0,07051742	0,039520846	
SWP III	1.499.232	1.680.755,81	1,121077865	0,191704661	0,042448685	0,00813761	
SWP IV	3.456.019	3.091857,12	0,894629664	0,441280021	0,097852409	0,043180313	0,461370934
SWP V	2.157.488	2.599.794,43	1,205009914	0,125251481	0,061086295	0,007651148	
SWP VI	4.792.520	7.167.415,53	1,495542122	0,0040166	0,13569359	0,000545026	
SWP VII	6.589.790	10.459.108,59	1,587168725	0,000798059	0,18658081	0,000148902	
SWP VIII	3.663.148	3.137.627,17	0,856538466	0,493338097	0,10371698	0,051167537	
SWP IX	2.249.400	2.400.838,10	1,067323775	0,241665643	0,063688657	0,01539136	
Jawa Timur	35.318.691	55.058.970,49	1,558918774				

$V_w 1999 = 0,435714114$

Lampiran 8 Hasil Perhitungan Indeks Williamson antar Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) Jawa Timur tahun 2000
 Note:

Populasi total Jawa Timur (N) : 34.783.640

Pendapatan perkapita rata-rata Jawa Timur (\bar{y}) : 1,634576508

Rumus :

$$V_w = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 \cdot \frac{f_i}{N}}}{\bar{y}}$$

Satuan Wilayah Pembangunan (SWP)	Jumlah penduduk pertengahan tahun (fi)	PDRB (Jutaan Rupiah)	Pendapatan Perkapita(yi) (Jutaan Rupiah)	(yi - \bar{y}) ²	fi/N	(yi - \bar{y}) ² · fi/N	Σ
SWP I	8.185.618	23.347.718,35	2,852285356	1,482814838	0,23532954	0,348950133	0,536183695
SWP II	2.425.308	2.070.824,32	0,853839726	0,609549921	0,069725537	0,042501195	
SWP III	1.488.877	1.738.888,34	1,167919405	0,217768851	0,042803944	0,009321365	
SWP IV	3.480.618	3.188.534,25	0,91608279	0,516233222	0,1000648	0,051656774	
SWP V	2.161.977	2.650.232,52	1,225837518	0,167067561	0,062154995	0,010384083	
SWP VI	4.705.893	7.390.435,73	1,570464039	0,004110408	0,135290412	0,000556098	
SWP VII	6.517.755	10.755.102,87	1,650123834	0,000241719	0,1873799	0,000045293	
SWP VIII	3.599.729	3.258.417,15	0,905184015	0,532013408	0,10348914	0,05505761	
SWP IX	2.217.865	2.456.367,29	1,107536883	0,277770765	0,063761728	0,017711144	
Jawa Timur	34.783.640	56.856.520,82	1,634576508				

$V_w 2000 = 0,4479727$

Lampiran 9 Hasil Perhitungan Indeks Williamson antar Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) Jawa Timur tahun 2001

Note:

Populasi total Jawa Timur (N) : 35.218.819

Pendapatan perkapita rata-rata Jawa Timur (\bar{y}) : 1,673384019

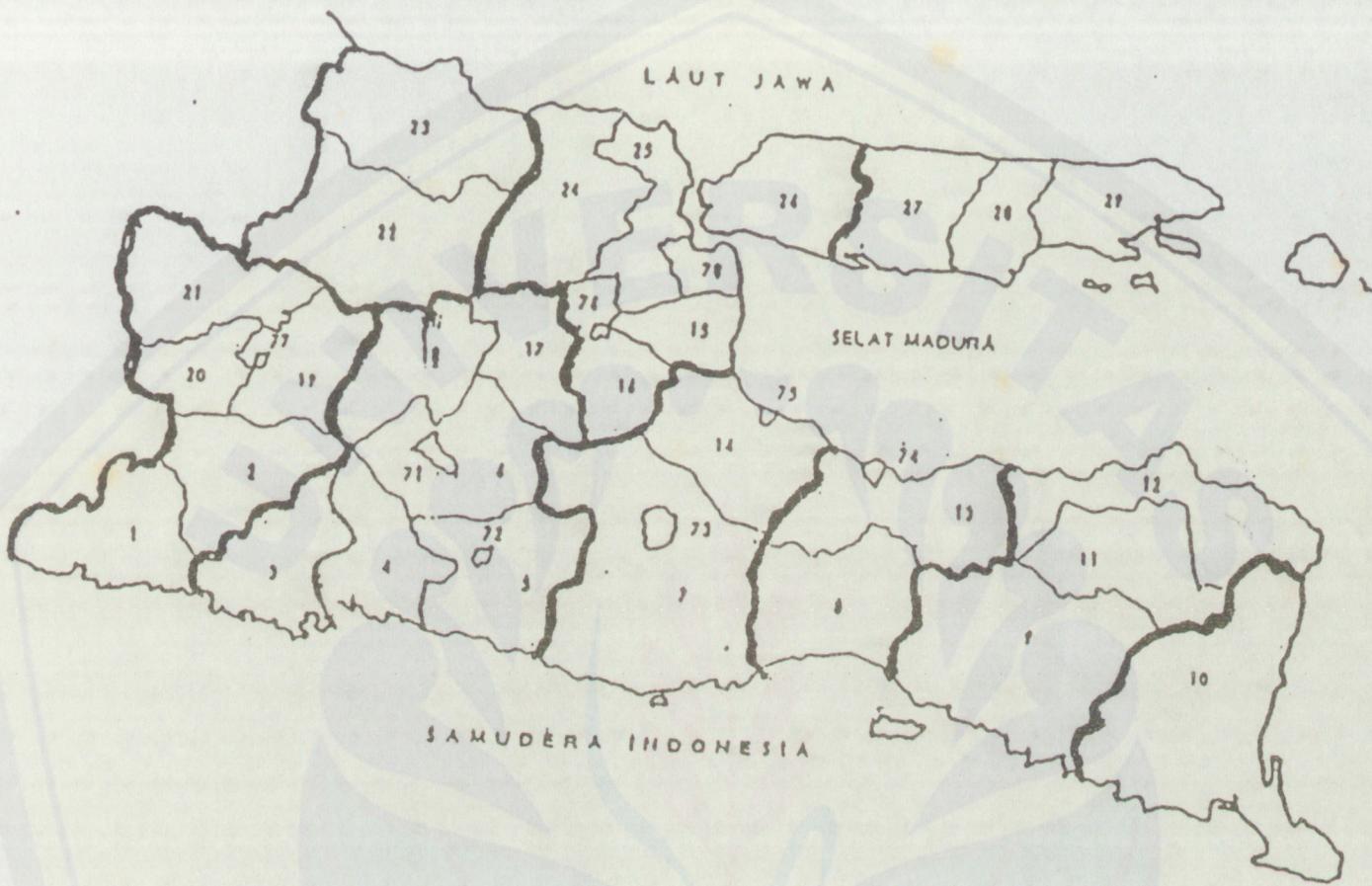
Rumus :

$$V_w = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 \cdot \frac{f_i}{N}}}{\bar{y}}$$

Satuan Wilayah Pembangunan (SWP)	Jumlah penduduk pertengahan tahun (fi)	PDRB (Jutaan Rupiah)	Pendapatan Perkapita (yi) (Jutaan Rupiah)	(yi - \bar{y}) ²	f _i /N	(yi - \bar{y}) ² · f _i /N	Σ
SWP I	8.288.494	24.275610,84	2.928832529	1,576150961	0,235342758	0,370935714	0,567536233
SWP II	2.442.539	2.012.222,77	0,823824213	0,721751864	0,069353234	0,050055826	
SWP III	1.492.425	1.797.170,97	1,204195166	0,220138179	0,042375782	0,009328527	
SWP IV	3.500.512	3.323.656,15	0,949477147	0,524041159	0,099393224	0,05208614	
SWP V	2.177.417	2.727.279,3	1,252529626	0,17711842	0,061825383	0,010950414	
SWP VI	4.925.764	7.873.697,33	1,598472304	0,005611765	0,139861702	0,000784871	
SWP VII	6.550.225	10.985.977,81	1,677190907	0,000014492	0,185986503	0,000002695	
SWP VIII	3.608.987	3.368.111,24	0,933256683	0,547788473	0,1032473254	0,056133667	
SWP IX	2.232.456	2.570.882,46	1,151593787	0,272265046	0,063388156	0,017258379	
Jawa Timur	35.218.819	58.934.608	1,673384019				

$$V_w 2001 = 0,450072839$$

Lampiran 18. Peta Wilayah Pembangunan Jawa Timur



Keterangan :

- | | | |
|---------------|----------------|---------------|
| 1 Pacitan | 11 Bondowoso | 21 Ngawi |
| 2 Ponorogo | 12 Situbondo | 22 Bojonegoro |
| 3 Trenggalek | 13 Probolinggo | 23 Tuban |
| 4 Tulungagung | 14 Pasuruan | 24 Lamongan |
| 5 Blitar | 15 Sidoarjo | 25 Gresik |
| 6 Kediri | 16 Mojokerto | 26 Bangkalan |
| 7 Malang | 17 Jombang | 27 Sampang |
| 8 Lumajang | 18 Nganjuk | 28 Pamekasan |
| 9 Jember | 19 Madiun | 29 Sumenep |
| 10 Banyuwangi | 20 Magetan | |